



LAPORAN KINERJA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2018

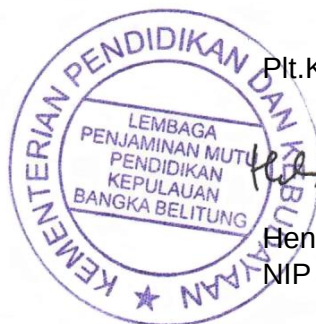
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya LPMP Kepulauan Bangka Belitung telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menopang tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang selanjutnya diatur dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP yang diperkuat dengan Rincian Tugas LPMP. Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja LPMP Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, yang meliputi kinerja sasaran strategis terkait program peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan di provinsi, yaitu: 1). Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya, 2). Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP, dan 3) Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013.

Target hasil secara umum dari program LPMP Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 berhasil dicapai dengan baik, bahkan untuk beberapa indikator target sasaran strategis dapat tercapai secara signifikan. Upaya pelaksanaan program layanan peningkatan penjaminan mutu pendidikan di provinsi, yang akan terus dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat provinsi mencapai Standar Nasional Pendidikan.

Di pihak lain, LPMP Kepulauan Bangka Belitung menyadari bahwa tantangan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di tingkat provinsi masih cukup banyak dan memerlukan kerja keras. Diharapkan, dukungan semua pihak dalam menjawab tantangan yang masih harus dihadapi sebagaimana ditargetkan, yang pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja LPMP Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018. Selain itu, laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, disampaikan terima kasih.



Plt. Kepala LPMP Kepulauan Bangka Belitung

Hendri Gunawan, MT

NIP 197106262003121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi	i
------------------	---

Ringkasan Eksekutif	ii
---------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

A. Dasar Hukum	2
----------------------	---

B. Tujuan	2
-----------------	---

C. Tugas dan Fungsi	3
---------------------------	---

D. Susunan Organisasi	3
-----------------------------	---

E. Mekanisme Kerja	5
--------------------------	---

BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
---	----------

A. Perencanaan Kinerja.....	7
-----------------------------	---

B. Perjanjian Kinerja.....	10
----------------------------	----

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
---	-----------

A. Capaian Kinerja	14
--------------------------	----

B. Realisasi Anggaran	63
-----------------------------	----

BAB IV PENUTUP	70
-----------------------------	-----------

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Unit Eselon III Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan berbagai kegiatan tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan dan program penjaminan mutu pendidikan di tingkat provinsi. LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaporkan capaian kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) program yang mendukung hasil tersebut. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program/kebijakan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaga. Laporan ini menyatakan capaian kinerja lembaga sesuai dengan kebijakan dalam tujuan dan sasaran strategis dari rencana strategis LPMP Kepulauan Bangka Belitung

LPMP Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan tugas dan fungsi, melaksanakan layanan penjaminan mutu pendidikan di tingkat provinsi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, sedangkan kegiatannya terdiri dari kegiatan pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi hasil peta mutu pendidikan, fasilitasi peningkatan mutu 8 standar satuan pendidikan di tingkat provinsi yang menjadi tanggungjawabnya, dan kegiatan rutin, yang meliputi berbagai kegiatan administrasi dan sifatnya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Kepulauan Bangka Belitung.

Keuangan yang dialokasikan pemerintah dari APBN, LPMP Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 28.615.450.000,- (Dua puluh delapan milyar enam ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan daya serap sampai Desember 2018 sebesar Rp. 25.083.359.674,- sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 3.532.090.326,-.

Setiap semester tahun anggaran, instansi berwenang selalu melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga pemerintah. LPMP Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk LAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permeneg PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP.

LAKIP disusun sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang kinerja instansi pemerintah dan kebermanfaatannya, antara lain:

- a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah (*good governance*) yang didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
- c. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya LPMP Kepulauan Bangka Belitung
- d. LAKIP juga digunakan sebagai bahan masukan bagi Kemdikbud dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Selanjutnya, selama kurun waktu Januari – Desember 2018 pelaksanaan program dan kegiatan, LPMP Kepulauan Bangka Belitung menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan tersebut mempengaruhi capaian target yang telah ditetapkan, yaitu keterlambatan juknis/pedoman kegiatan dari pusat sehingga terjadi pengunduran dan perubahan sebagian besar jadwal kegiatan mengingat terdapat beberapa kegiatan merupakan prasyarat bagi kegiatan lainnya sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Capaian sasaran strategis LPMP tersebut merupakan capaian kinerja LPMP Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 yaitu 87,66% dan kinerja ini merupakan kontribusi LPMP Kepulauan Bangka Belitung untuk menopang tujuan strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pangkalpinang, Desember 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

LPMP Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 100 orang, yang terdiri dari 5 orang pejabat struktural, 13 orang tenaga fungsional tertentu, 48 orang tenaga fungsional umum dan 34 orang tenaga honorer. Kualifikasi tingkat pendidikan pegawai meliputi SMA sederajat dan di bawahnya sebanyak 30 orang, S1 sebanyak 21 orang dan S2 sebanyak 49 orang. Pada tanggal 16 September 2014, Bapak Enang Ahmadi, M.Pd dilantik sebagai Kepala LPMP Kepulauan Bangka Belitung dan masih menjabat hingga saat ini.

LPMP Kepulauan Bangka Belitung memiliki beberapa fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, meliputi: fasilitas lima gedung asrama, masing-masing gedung memiliki kapasitas 12 kamar yang dilengkapi dengan tiga tempat tidur, meja belajar, lemari pakaian, kamar mandi dan pendingin ruangan. Delapan ruang belajar yang telah dilengkapi dengan sarana pendingin ruangan, proyektor dan sound system. Satu ruang laboratorium komputer dengan jumlah komputer yang cukup dan dilengkapi dengan jaringan internet. Ruang perpustakaan dengan jumlah koleksi buku yang cukup banyak. Dua ruang makan yang memiliki kapasitas 90 orang yang dilengkapi dengan pendingin ruangan dan televisi. Selain itu terdapat juga sarana olahraga berupa lapangan futsal dan jogging track.

Sebagai lembaga pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan tugas dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Permen PAN&RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

4. Permendikbud No.11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Permendikbud No. 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP),
6. Permendikbud No. 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: DIPA-023.03.2.419577/2017,
8. Kontrak Kinerja Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2017.

C. TUJUAN

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini, disusun bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang:

1. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran strategis LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2017;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

D. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan Permendikbud No. 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja LPMP, dinyatakan: memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

3. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

E. ISU-ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN

Program penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan LPMP diharapkan dapat mengatasi permasalahan pendidikan yang terjadi khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain seperti:

1. Tuntutan terhadap satuan pendidikan untuk melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan berkaitan dengan pencapaian SNP melalui Aplikasi PMP;
2. Pengukuran kualitas sekolah yang didasarkan atas 8 SNP menuntut dilakukannya pemetaan mutu pendidikan pada seluruh satuan pendidikan agar dapat diperoleh potret mutu pendidikan yang akurat khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 di satuan pendidikan menuntut dilakukannya sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dalam implementasi Kurikulum 2013 bagi satuan pendidikan.

Ketiga isu utama pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut perlu perencanaan yang tepat sasaran agar permasalahan dapat diatasi. Keberhasilan dalam penyelesaian masalah-masalah pendidikan tersebut juga tidak lepas dengan terwujudnya kerja sama yang sinergis antara LPMP Kepulauan Bangka Belitung dengan seluruh pemangku kepentingan.

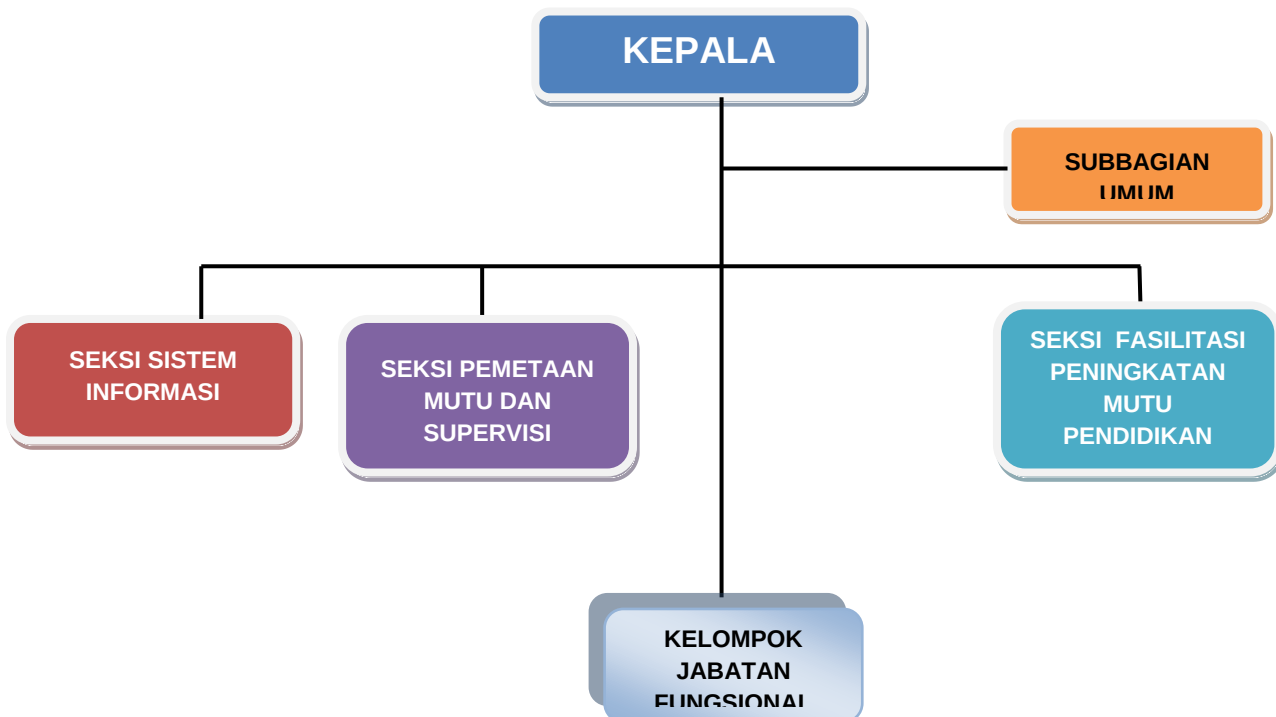
F. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi LPMP terdiri dari:

- a) Kepala;
- b) Subbagian Umum;
- c) Seksi Sistem Informasi;
- d) Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi;
- e) Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 1.1. Struktur Organisasi LPMP

(Permendikbud No. 14 Tahun 2015)



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LPMP dibantu oleh Subbagian Umum, tiga Seksi, dan Kelompok Tenaga Fungsional yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan dan kerumahtanggaan LPMP.
- Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.
- Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.

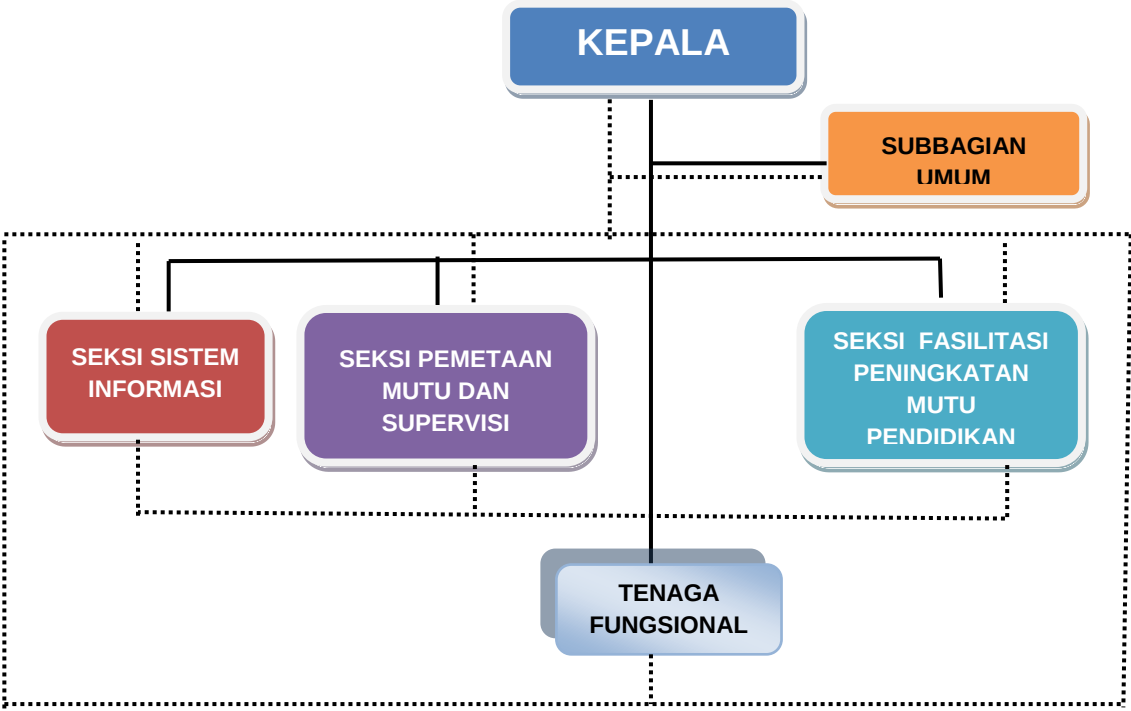
Menurut Permendikbud tersebut Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, menyampaikan laporan hasil pemetaan mutu pendidikan, supervisi, dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan tembusan kepada unit organisasi yang secara fungsional berhubungan kerja dengan LPMP. Disamping itu diwajibkan LPMP menyampaikan hasil pemetaan mutu tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah Provinsi, maupun lembaga/yayasan

yang mengelola pendidikan yang didirikan oleh masyarakat sebagai bahan peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelolanya.

G. MEKANISME KERJA LPMP

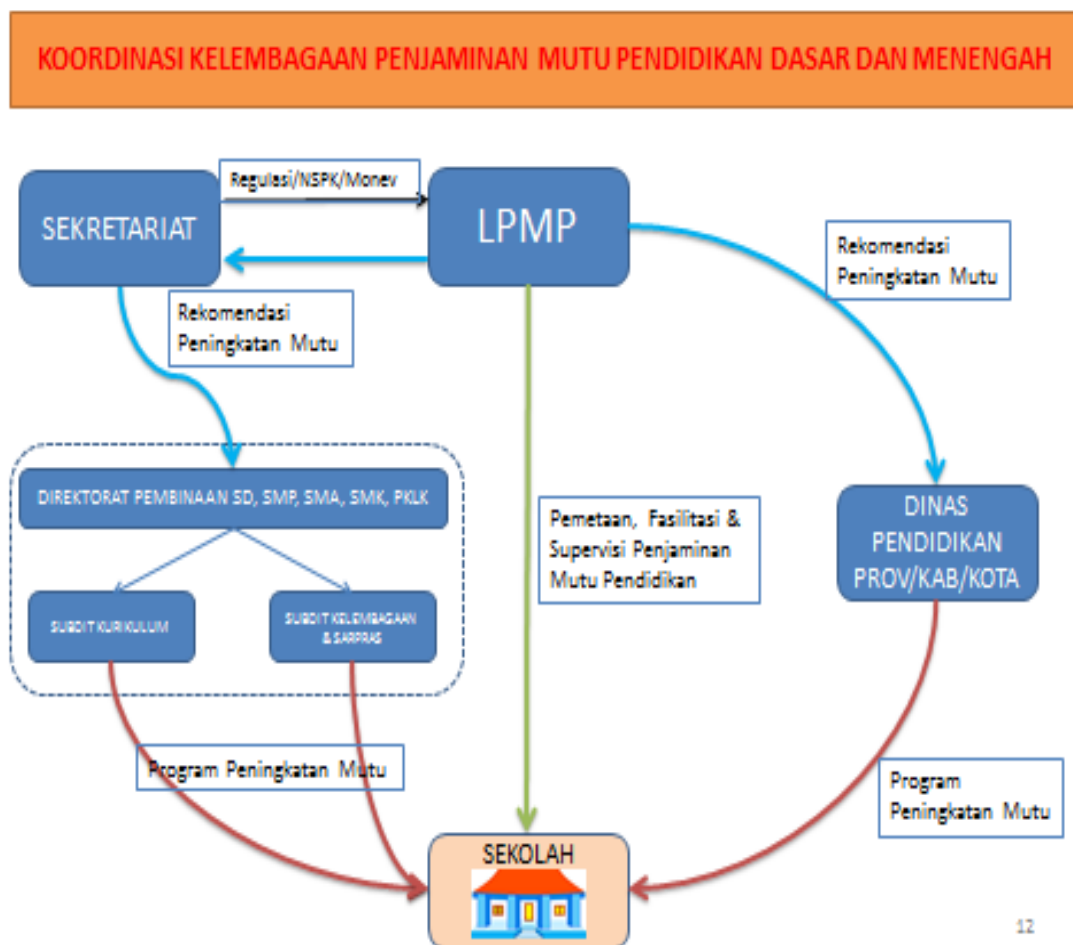
1) Mekanisme Kerja Internal

Bagan 1.2 Mekanisme Kerja Internal LPMP



2) Mekanisme Kerja Eksternal

Bagan 1.3 Mekanisme Kerja Eksternal LPMP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Sebagai unit pelaksana teknis yang berada di dalam naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), LPMP mendukung setiap perencanaan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikdasmen. Salah satunya adalah visi yang dimiliki LPMP harus selaras dengan visi dan misi Ditjen Dikdasmen, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Tema pembangunan pendidikan Kemdikbud 2015-2019 difokuskan pada penguatan layanan pendidikan, sebagaimana tercermin di dalam visi Kemdikbud yaitu *terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong* dan visi Ditjen Dikdasmen yaitu *terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dasar dan menengah yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong*. Maka sejalan dengan visi Kemdikbud dan Ditjen Dikdasmen tersebut, LPMP Kepulauan Bangka Belitung merumuskan visi lembaga yang selaras dengan keduanya.

Visi LPMP Kepulauan Bangka Belitung dalam Renstra 2015-2019 :

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkarakter di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Berlandaskan Gotong Royong”

2. Misi

Dalam rangka mencapai visi ini, ada tiga misi yang harus diemban LPMP Kepulauan Bangka Belitung, yaitu :

No	Misi
1	Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan dasar sesuai SNP
2	Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan menengah sesuai SNP
3	Memperkuat tata kelola penjaminan mutu pendidikan dan pelibatan publik

3. Tujuan Strategis

Rumusan tentang tujuan strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran tercapainya visi dan terlaksananya misi. Tujuan strategis LPMP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Kode	Tujuan Strategis
T1	Pengembangan peta mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
T2	Pengembangan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah
T3	Peningkatan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan
T4	Peningkatan fasilitas peningkatan mutu Pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan
T5	Peningkatan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan
T6	Penguatan tata kelola penjaminan mutu pendidikan

B. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Lampiran I menyatakan Perjanjian Kinerja merupakan suatu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja antara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah target minimal yang diamanahkan kepada Direktur Jenderal Dikdasmen selama lima tahun ke depan. Perjanjian Kinerja menetapkan target yang terukur dalam satuan waktu tertentu dan menjadi arah yang ingin dicapai, sebagai landasan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selanjutnya perjanjian kinerja LPMP Kepulauan Bangka Belitung dengan Direktur Jenderal Dikdasmen harus mampu mendukung dan memberikan kontribusi kepada perjanjian kinerja antara Direktur

Jenderal Dikdasmen dengan Mendikbud. Perjanjian Kinerja dirinci dalam rencana aksi setiap tahun, yang ditetapkan dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional.

Dengan demikian LPMP Kepulauan Bangka Belitung wajib menyusun perjanjian kinerja tingkat eselon III yang ditandatangani oleh Kepala LPMP. Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja LPMP Kepulauan Bangka Belitung yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun sesuai rencana strategis LPMP Kepulauan Bangka Belitung. Berikut adalah Perjanjian Kinerja LPMP Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	ANGGARAN
1. Meningkatnya penjaminan mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya		1150 Sekolah	Rp. 1.542.822.000,-
	1	SD yang telah dipetakan mutunya	100%	
	2	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	75%	
		Output :		
		SD yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	809	
	3	SMP yang telah dipetakan mutunya	100%	
	4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	
		Output :		
		SMP yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	210	
	5	SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	
	6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	
		Output :		
		SMA yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	67	
	7	SMK yang telah dipetakan mutunya	90%	
	8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	70%	

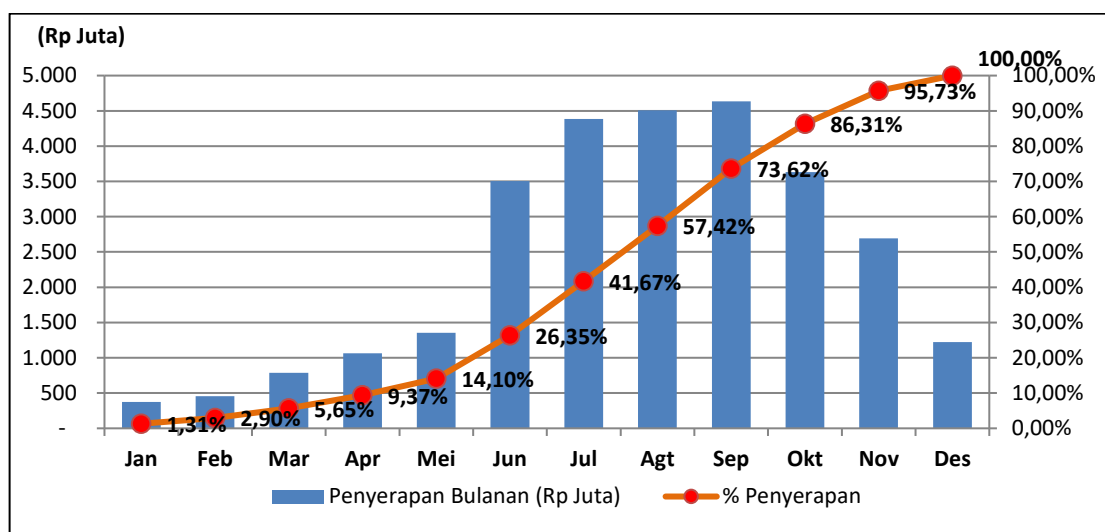
	Output :		
	SMK yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	48	
	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	112 Sekolah	Rp. 3.185.119.000,-
	Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013	368 Sekolah	Rp. 3.385.754.000,-
9	SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
	Output		
	a. SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	80	
	b. SD yang melaksanakan Kurikulum 2013	278	Rp. 1.769.284.000,-
10	SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
	Output		
	a. SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	26	
	b. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013	88	Rp.1.159.210.000,-
11	SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
	Output		
	a. SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	4	
	b. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013	2	Rp. 457.260.000,-
12	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
	Output		
	a. SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	2	
	b. SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013	-	
2. Terwujudnya tata kelola LPMP Kep Babel yang baik	1	Data Pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan dan terbarukan	92% Rp. 249.440.000,-
	2	Nilai minimal SAKIP LPMP Kepulauan Bangka Belitung	78

Jumlah Anggaran :

Program Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 28.615.450.000,-

(Dua puluh delapan milyar enam ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

**Rencana Penyerapan Anggaran
LPMP Kepulauan Bangka Belitung
Periode Januari – Desember 2018**



(dalam jutaan)

NO	KOMPONEN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penyerapan Bulanan (Rp Juta)	374	456	787	1.064	1.354	3.505	4.384	4.507	4.635	3.031	2.395	2.123
2	Penyerapan Kumulatif	374	830	1.617	2.681	4.035	7.540	11.924	16.431	21.066	24.097	26.492	28.615
3	% Penyerapan	1,31%	2,90%	5,65%	9,37%	14,10%	26,35%	41,67%	57,42%	73,62%	84,21%	92,58%	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018, LPMP Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja LPMP Kepulauan Bangka Belitung.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah bagian dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dari hasil pengukuran yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan informasi yang bermanfaat khususnya bagi unit kerja. Pengukuran yang dilakukan di LPMP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 didasari oleh dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja LPMP Kepulauan Bangka Belitung Periode Januari – Desember 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Realisasi			
				Target	%	Anggaran	%
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	1150 Sekolah	Rp. 1.984.802.000	1082sekolah	94,09%	Rp. 1.314.902.950	66,25%
	1. SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya	809 Sekolah		793 sekolah	98,02%		
	2. SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya	210 Sekolah		188 sekolah	89,52%		
	3. SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya	67 Sekolah		53 sekolah	79,10%		
	4. SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya	48 Sekolah		48 sekolah	100%		
	5. Persentase SD yang meningkat Indeks Efektivitasnya	75%		463 sekolah	58,39%		
	6. Persentase SMP yang meningkat Indeks Efektivitasnya	80%		168 Sekolah	89,36%		
	7. Persentase SMA yang meningkat Indeks Efektivitasnya	80%		40 Sekolah	75,47%		
	8. Persentase SMK yang meningkat Indeks Efektivitasnya	70%		27 Sekolah	56,25%		
	Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	112 Sekolah	Rp. 2.890.123.000,-	112 Sekolah	100%	Rp. 2.462.579.272	85,21%
	1. SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8	80 Sekolah		80 Sekolah	100%		

	SNP						
	2. SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	26 Sekolah		26 Sekolah	100%		
	3. SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	4 Sekolah		4 Sekolah	100%		
	4. SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	2 Sekolah		2 Sekolah	100%		
	Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013	368 Sekolah	Rp. 2.856.841.000,-	366 Sekolah	99,46%	Rp. 2.636.951.071,-	92,30%
	1. SD yang melaksanakan Kurikulum 2013	278 Sekolah	Rp . 1.595.878.000,-	277 Sekolah	99,64%	Rp. 1.524.622.071,-	95,54%
	2. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013	88 Sekolah	Rp. 1.136.737.000,-	87 Sekolah	98,86%	Rp. 1.022.573.100,-	89,96%
	3 SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013	2 Sekolah	Rp . 124.226.000,-	2 Sekolah	100%	Rp. 89.755.900,-	72,25%
	4 SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013	-	-	-	-	-	-
Terwujudnya tata kelola LPMP Kep Babel yang baik	Data Pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan dan terbarukan	92%	Rp. 249.440.000	85%	92,39%	Rp. 148.337.971	60,30%
	Nilai minimal SAKIP LPMP Kep Babel	78		71	91.03%		

Berdasarkan data kinerja di atas, secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Persentase SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Kepulauan Bangka Belitung

Indikator kinerja Satuan Pendidikan telah dipetakan mutunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mencapai 97,78% dari target yang telah ditetapkan. Capaian indikatornya sebesar 97,78% atau sejumlah 793 sekolah dari target renstra. Target renstra sebanyak 811 sekolah.

Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu:

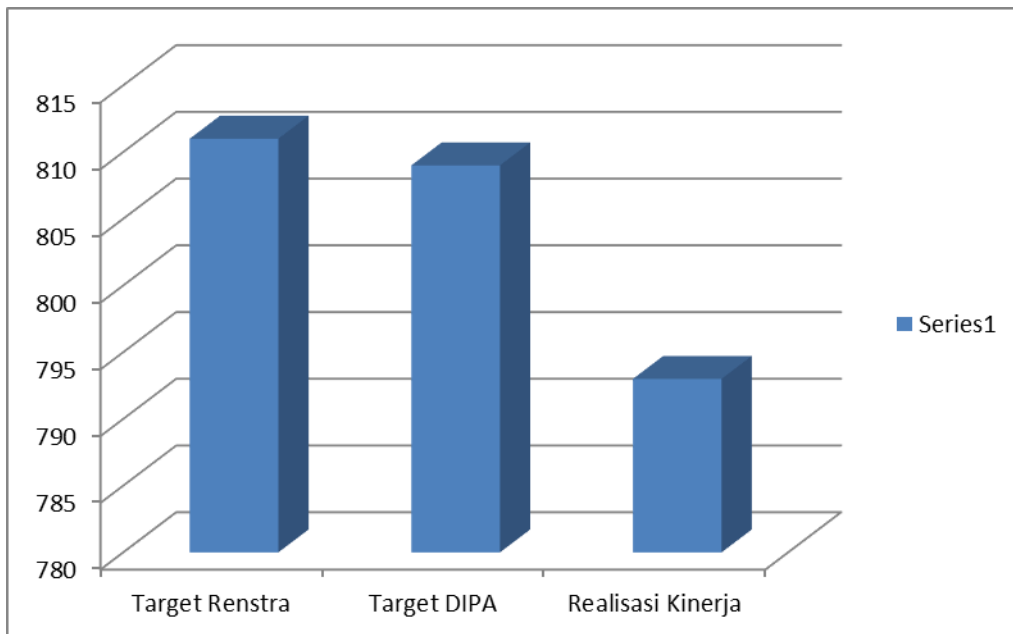
1. Fungsi koordinasi berjalan dengan baik antara LPMP Kepulauan Bangka Belitung dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
2. Adanya strategi pencapaian dengan melibatkan unsur diluar LPMP yaitu pengawas diseluruh kabupaten/kota dan dinas pendidikan kabupaten/kota

Jika dibandingkan dengan target yang tercantum pada DIPA indikator kinerja persentase SD telah dipetakan mutu pendidikannya di Kep Babel belum mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 793 Sekolah dari target sejumlah 809 Sekolah dengan capaian 98,02%.

Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini melalui surat edaran Ditjen Dikdasmen Kemdikbud mengeluarkan kebijakan tentang pemetaan data mutu kepada seluruh sekolah.
2. Dalam rangka pemetaan mutu pendidikan, seluruh sekolah wajib melakukan pemetaan melalui aplikasi pemetaan mutu pendidikan yang terintegrasi dengan Dapodik, sehingga baik sekolah maupun pihak-pihak terkait fokus dalam memfasilitasi pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan.

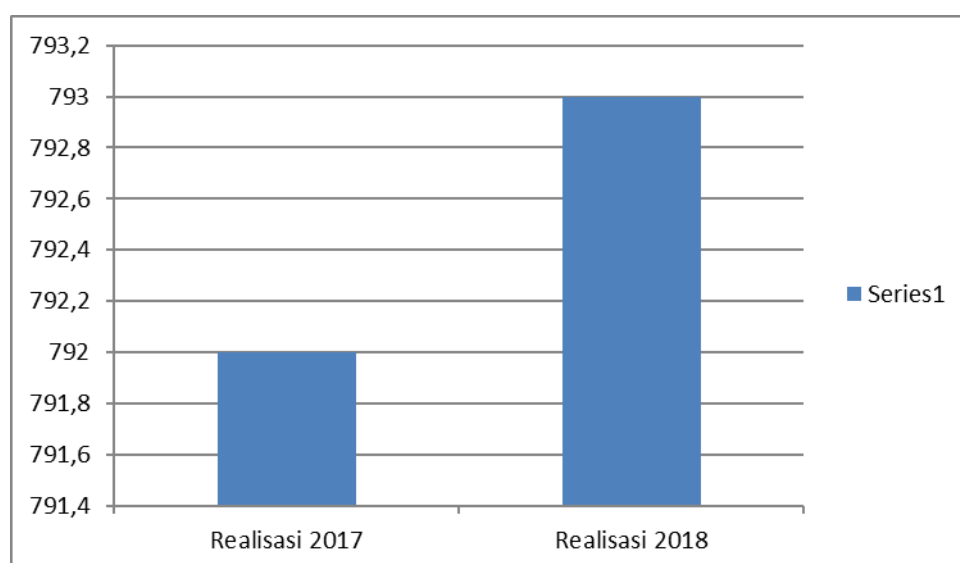
Pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Target renstra tahun 2018 belum tercapai jika dibanding dengan tahun 2017, target SD yang telah dipetakan mengalami penurunan sejumlah 7 SD. Tahun 2017 jumlah SD yang dipetakan sebanyak 800 sekolah, sedangkan pada tahun 2018 sejumlah 793 sekolah.

Berikut adalah gambar perbandingan capaian tahun 2017 dan 2018

Gambar 3.1 : Perbandingan jumlah SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya



Hasil dari pelaksanaan Program tersebut adalah sebagai berikut.

a) Gambaran Umum Capaian SNP

Dari 793 sekolah dasar yang dipetakan mutunya, sebanyak 793 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul di server pusat. Standar yang akan diolah dalam peta capaian mutu ini adalah:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan;
- 2) Standar Isi;
- 3) Standar Proses;
- 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 5) Standar Sarana dan Prasarana;
- 6) Standar Pengelolaan;
- 7) Standar Pembiayaan Pendidikan;
- 8) Standar Penilaian Pendidikan.

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0–7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

- 1) Menuju SNP level 1 : skor $< 2,04$
- 2) Menuju SNP level 2 : $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
- 3) Menuju SNP level 3 : $3,70 \leq \text{skor} < 5,06$
- 4) Menuju SNP level 4 : $5,06 \leq \text{skor} < 6,66$
- 5) SNP : $6,66 \leq \text{skor} \leq 7,0$

Skor peta capaian mutu jenjang SD untuk masing-masing kabupaten/kota dipaparkan pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2. Skor Peta Capaian SNP Jenjang Sekolah Dasar (SD) Kep Babel Tahun 2018

Kab/Kota	Skor Rata-rata	Keterangan
Kota Pangkalpinang	5,57	Menuju SNP 4
Kab. Bangka	5,73	Menuju SNP 4
Kab. Bangka Tengah	5,63	Menuju SNP 4
Kab. Bangka Barat	5,46	Menuju SNP 4
Kab. Bangka Selatan	5,54	Menuju SNP 4
Kab. Belitung	5,5	Menuju SNP 4
Kab. Belitung Timur	5,7	Menuju SNP 4
Rata-rata	5,6	Menuju SNP 4

Berdasarkan data pada Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa capaian mutu SNP jenjang SD di 7 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan. Menuju SNP 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan jenjang SD di Kep Babel belum mencapai SNP.

b) Capaian SNP untuk Setiap Standar

Skor capaian mutu jenjang SD di Kep Babel untuk masing-masing standar dipaparkan pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3. Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang Sekolah Dasar (SD) Kep Babel Tahun 2018

Standar	Skor Rata-rata	Keterangan
Standar Kompetensi Lulusan	6.23	Menuju SNP 4
Standar Isi	5.87	Menuju SNP 4
Standar Proses	6.5	Menuju SNP 4
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.18	Menuju SNP 3
Standar Sarana dan Prasarana	4.13	Menuju SNP 3
Standar Pengelolaan	5.96	Menuju SNP 4

Standar Pembiayaan Pendidikan	5.82	Menuju SNP 4
Standar Penilaian Pendidikan	6.07	Menuju SNP 4
Rata-rata	5,59	Menuju SNP 4

Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa capaian mutu jenjang SD di Kep Babel secara umum belum mencapai SNP. Capaian mutu yang paling baik adalah pada Standar Proses dengan skor mutu 6,5 dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar Sarana dan Prasarana dengan skor mutu 4,13.

Perbandingan Capaian SNP Provinsi Kep Babel Tahun 2017 dan 2018

No	Capaian SNP	Jumlah Sekolah Tahun 2017	Persentase Jumlah Sekolah Tahun 2017	Jumlah Sekolah Tahun 2018	Persentase Jumlah Sekolah Tahun 2018
1	Menuju SNP level 1 : skor < 2,04	0	0%	7	0,88%
2	Menuju SNP level 2 : 2,04 < skor < 3,70	5	0,63%	6	0,75%
3	Menuju SNP level 3 : 3,70 < skor < 5,06	147	18,56%	48	6,05%
4	Menuju SNP level 4 : 5,06 < skor < 6,66	640	80,81%	732	92,31%
5	SNP : 6,66 < skor < 7,0	0	0%	0	0%
	Jumlah	792	100%	793	100%

c) Hambatan dan kendala

Kendala:

1. Petugas pemetaan khususnya untuk Pengawas masih sulit untuk memahami pemetaan yang berbasis IT (online) karena pengetahuan tentang IT kurang.

Solusi:

Mendampingi Pengawas dengan operator dalam pembelajaran dikelas.

2. Terdapat data yang tidak lengkap setelah dilakukan validasi dan verifikasi pada aplikasi PMP.

Solusi:

Mendampingkan Pengawas dengan operator dalam validasi data satuan pendidikan.

d) Langkah antisipasi yang dilakukan kedepan

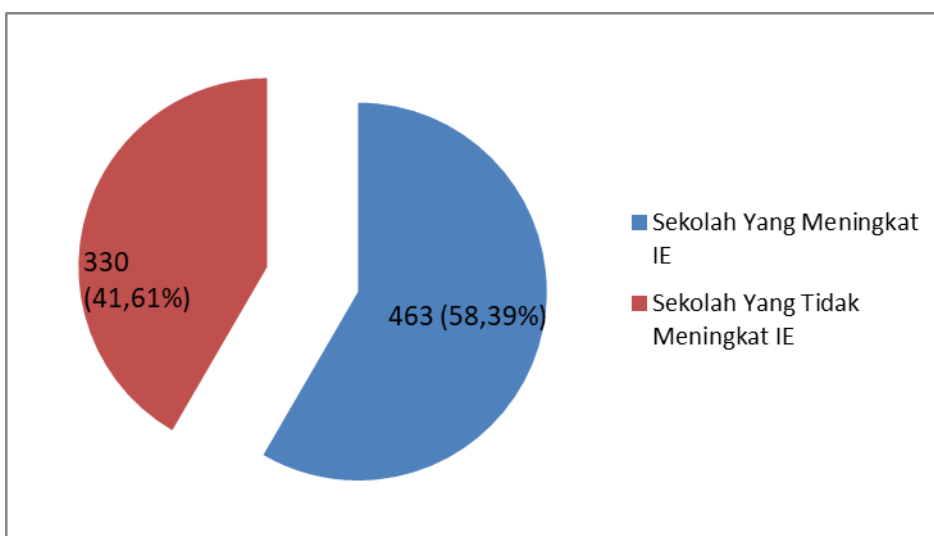
Untuk memecahkan kendala di atas, hal yang harus dilakukan adalah: Pertama, perlu penyempurnaan aplikasi pemetaan mutu dan pengurangan jumlah pertanyaan pada kuisisioner, sehingga sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana komputer tetap bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa mengalami kendala berarti. Kedua, server pusat sebaiknya lebih disiapkan kinerjanya untuk menerima data dari seluruh sekolah di Indonesia. Ketiga, kedepan disamping melatih pengawas, operator sekolah juga dilatih tentang penggunaan aplikasi PMP.



2. Persentase SD yang meningkat Indeks Efektivitasnya di Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan rerata capaian Standar Nasional Pendidikan sejumlah 793 sekolah jenjang SD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, sebanyak 463 sekolah mengalami kenaikan rerata capaian SNP atau sebesar 58,39%.

Secara visual persentase SD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meningkat indeks efektivitasnya dapat di lihat pada gambar berikut :



Tabel 3.4 Perbandingan SD di Provinsi Kep Babel yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya



3. Persentase SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Kep Babel

Indikator kinerja Satuan Pendidikan telah dipetakan mutunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai 89,10% dari target yang telah ditetapkan. Capaian indikatornya sebesar 89,10% atau sejumlah 188 sekolah dari target renstra. Target renstra 211 sekolah

Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu:

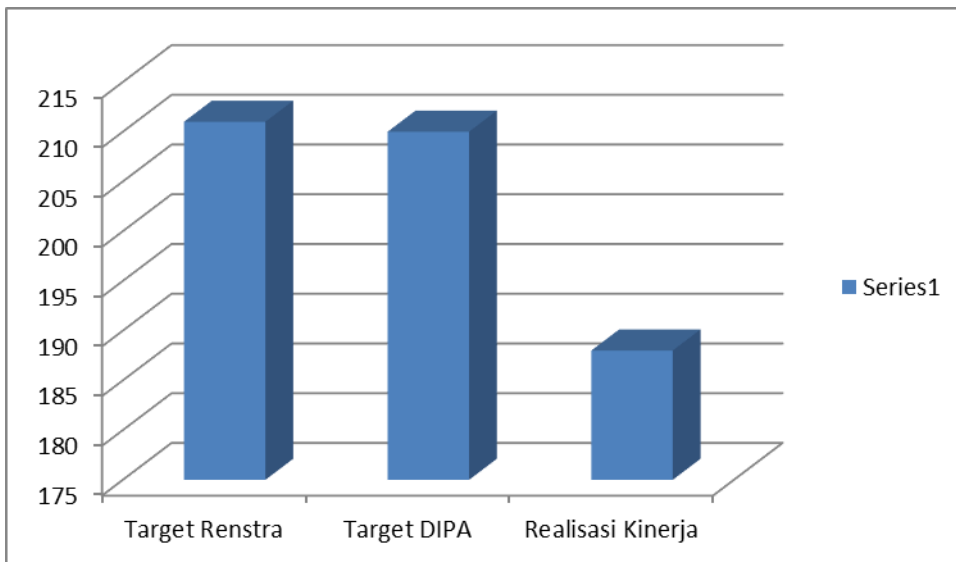
1. Fungsi koordinasi berjalan dengan baik antara LPMP Kepulauan Bangka Belitung dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
2. Adanya strategi pencapaian dengan melibatkan unsur diluar LPMP yaitu pengawas diseluruh kabupaten/kota dan dinas pendidikan kabupaten/kota

Jika dibandingkan dengan target yang tercantum pada DIPA indikator kinerja persentase SMP telah dipetakan mutu pendidikannya di Kep Babel telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 188 sekolah dari target sejumlah 210 sekolah dengan capaian 89,52%.

Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Pemerintah dalam hal ini melalui surat edaran Ditjen Dikdasmen Kemdikbud mengeluarkan kebijakan tentang pemetaan data mutu kepada seluruh sekolah.
2. Dalam rangka pemetaan mutu pendidikan, seluruh sekolah wajib melakukan pemetaan melalui aplikasi pemetaan mutu pendidikan yang terintegrasi dengan Dapodik, sehingga baik sekolah maupun pihak-pihak terkait focus dalam memfasilitasi pelaksanaan pemetaan mutu Pendidikan

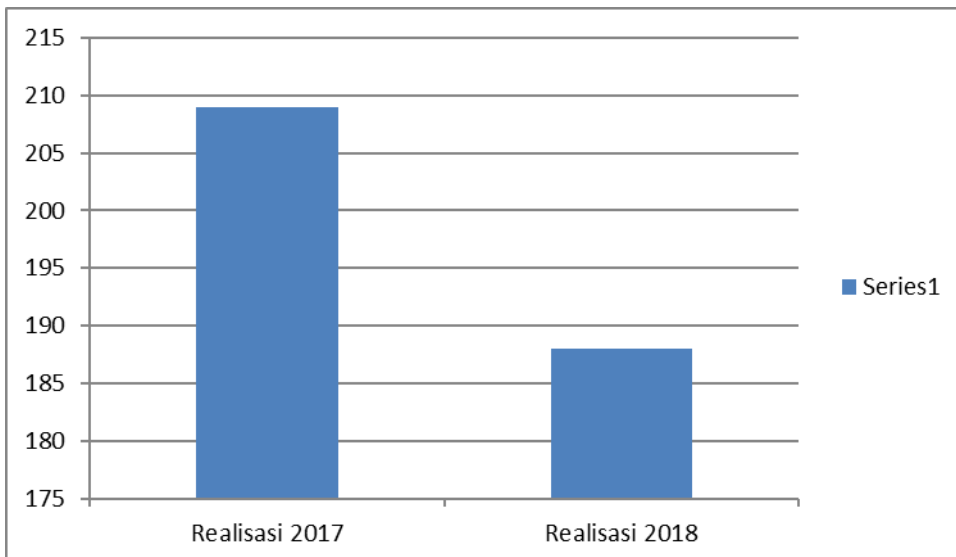
Pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Target renstra tahun 2018 belum tercapai jika dibanding dengan tahun 2017, target SMP yang telah dipetakan mengalami penurunan sejumlah 21 SMP. Tahun 2017 jumlah SMP yang dipetakan sebanyak 209 sekolah, sedangkan pada tahun 2018 sejumlah 188 sekolah

Berikut adalah gambar perbandingan capaian tahun 2017 dan 2018

Gambar3.5 : Perbandingan jumlah SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya



Hasil dari pelaksanaan Program tersebut adalah sebagai berikut.

a) Gambaran Umum Capaian SNP

Dari 188 SMP yang dipetakan mutunya, sebanyak 188 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul di server pusat. Standar yang akan diolah dalam peta capaian mutu ini adalah:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan;
- 2) Standar Isi;
- 3) Standar Proses;
- 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 5) Standar Sarana dan Prasarana;
- 6) Standar Pengelolaan;
- 7) Standar Pembiayaan Pendidikan;
- 8) Standar Penilaian Pendidikan.

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0–7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis ,yaitu:

- 1) Menuju SNP level 1 : skor $< 2,04$
- 2) Menuju SNP level 2 : $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
- 3) Menuju SNP level 3 : $3,70 \leq \text{skor} < 5,06$
- 4) Menuju SNP level 4 : $5,06 \leq \text{skor} < 6,66$
- 5) SNP : $6,66 \leq \text{skor} \leq 7,0$

Skor peta capaian mutu jenjang SMP untuk masing-masing kabupaten/kota dipaparkan pada tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6. Skor Peta Capaian SNP Jenjang SMP di Kep Babel
Tahun 2018

Kab/Kota	Skor Rata-rata	Keterangan
Kota Pangkalpinang	5,34	Menuju SNP 4
Kab. Bangka	5,45	Menuju SNP 4
Kab. Bangka Tengah	5,47	Menuju SNP 4
Kab. Bangka Barat	5,01	Menuju SNP 4
Kab. Bangka Selatan	5,45	Menuju SNP 4
Kab. Belitung	5,54	Menuju SNP 4
Kab. Belitung Timur	5,47	Menuju SNP 4
Rata-rata	5,47	Menuju SNP 4

Berdasarkan data pada Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa capaian mutu SNP jenjang SMP di 7 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan Menuju SNP 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan jenjang SMP di Kep Babel belum mencapai SNP.

b) Capaian SNP untuk Setiap Standar

Skor capaian mutu jenjang SMP diKep Babel untukmasing-masing standar dipaparkan pada tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7. Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SMP di Kep Babel
Tahun 2018

Standar	Skor Rata-rata	Keterangan
Standar KompetensiLulusan	6.39	Menuju SNP 4
StandarIsi	5.75	Menuju SNP 4
Standar Proses	6.43	Menuju SNP 4
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.57	Menuju SNP 2
Standar Sarana dan Prasarana	4.19	Menuju SNP 4
Standar Pengelolaan	5.82	Menuju SNP 4
Standar Pembiayaan Pendidikan	5.69	Menuju SNP 4
Standar Penilaian Pendidikan	5.95	Menuju SNP 4
Rata-rata	5,47	Menuju SNP 4

Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa capaian mutu jenjang SMP di Kep Babel secara umum belum mencapai SNP. Capaian mutu yang paling baik adalah pada standar Kompetensi Lulusan dengan skor mutu 6,39 dan

capaian mutu yang paling rendah ada pada standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan skor mutu 3,57.

Perbandaingan Capaian SNP Provinsi Kep Babel Tahun 2017 dan 2018

No	Capaian SNP	Jumlah Sekolah Tahun 2017	Persentase Jumlah Sekolah Tahun 2017	Jumlah Sekolah Tahun 2018	Persentase Jumlah Sekolah Tahun 2018
1	Menuju SNP level 1 : skor < 2,04	0	0%	0	0%
2	Menuju SNP level 2 : 2,04 < skor < 3,70	4	1,91%	1	0,53%
3	Menuju SNP level 3 : 3,70 < skor < 5,06	61	29,19%	23	12,23%
4	Menuju SNP level 4 : 5,06 < skor < 6,66	144	68,90%	164	87,23%
5	SNP : 6,66 < skor < 7,0	0	0%	0	0%
	Jumlah	209	100%	188	100%

c) Hambatan dan kendala

Kendala:

1. Petugas pemetaan khususnya untuk Pengawas masih sulit untuk memahami pemetaan yang berbasis IT (online) karena pengetahuan tentang IT kurang.

Solusi:

Mendampingi Pengawas dengan operator dalam pembelajaran dikelas.

2. Terdapat data yang tidak lengkap setelah dilakukan validasi dan verifikasi pada aplikasi PMP.

Solusi:

Mendampingi Pengawas dengan operator dalam validasi data satuan pendidikan.

d) Langkah antisipasi yang dilakukan kedepan

Untuk memecahkan kendala di atas, hal yang harus dilakukan adalah: Pertama, perlu penyempurnaan aplikasi pemetaan mutu dan pengurangan jumlah pertanyaan pada kuisisioner, sehingga sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana komputer tetap bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa mengalami kendala berarti. Kedua, server pusat sebaiknya lebih disiapkan

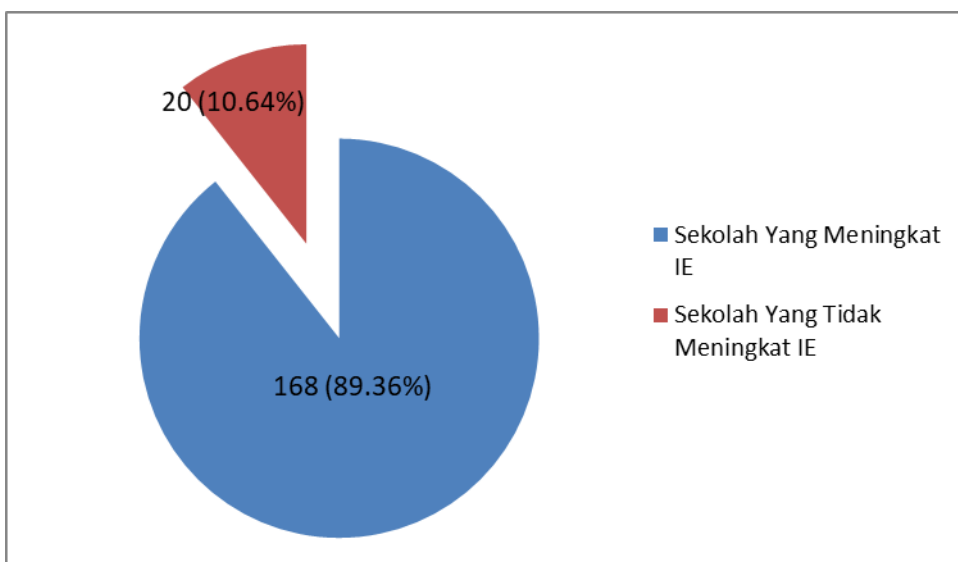
kinerjanya untuk menerima data dari seluruh sekolah di Indonesia. Ketiga, ke depan disamping melatih pengawas, operator sekolah juga dilatih tentang penggunaan aplikasi PMP.



4. Persentase SMP yang meningkat Indeks Efektivitasnya di Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan rerata capaian Standar Nasional Pendidikan sejumlah 188 sekolah jenjang SMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, sebanyak 168 sekolah mengalami kenaikan rerata capaian SNP atau sebesar 89,36%.

Secara visual persentase SD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meningkat indeks efektivitasnya dapat di lihat pada gambar berikut :



Tabel 3.8 Perbandingan SMP di Provinsi Kep Babel yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya



5. Persentase SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Kep Babel

Indikator kinerja Satuan Pendidikan telah dipetakan mutunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian indikatornya sebesar 77,94% atau sejumlah 53 SMA dari target renstra. Target renstra 68 SMA.

Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu:

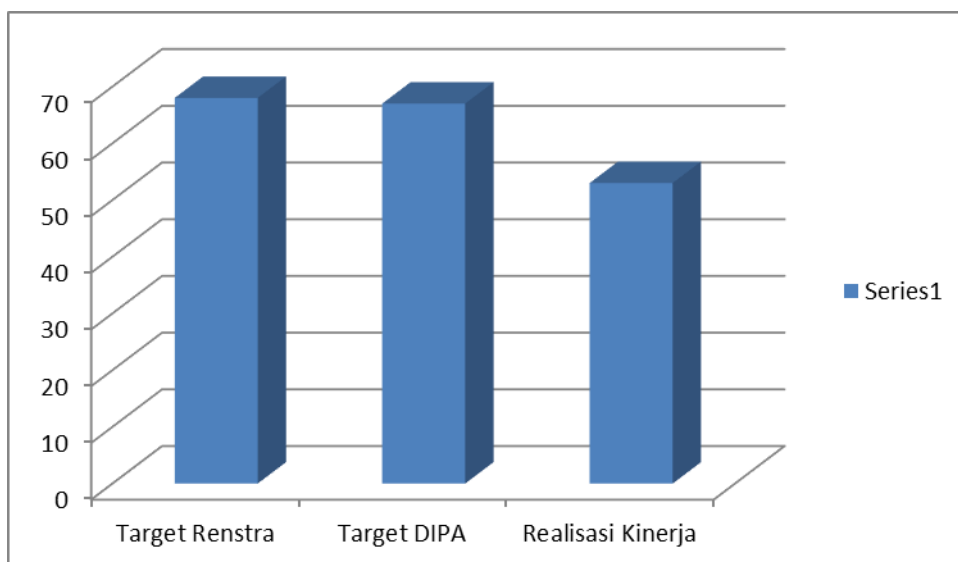
1. Fungsi koordinasi berjalan dengan baik antara LPMP Kepulauan Bangka Belitung dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
2. Adanya strategi pencapaian dengan melibatkan unsur diluar LPMP yaitu pengawas diseluruh kabupaten/kota dan dinas pendidikan kabupaten/kota

Jika dibandingkan dengan target yang tercantum pada DIPA indikator kinerja persentase SMA telah dipetakan mutu pendidikannya di Provinsi Kep Babel belum melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi 53 SMA dari target sejumlah 67 SMA dengan capaian 79,10%.

Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini melalui surat edaran Ditjen Dikdasmen Kemdikbud mengeluarkan kebijakan tentang pemetaan data mutu kepada seluruh sekolah.
2. Dalam rangka pemetaan mutu pendidikan, seluruh sekolah wajib melakukan pemetaan melalui aplikasi pemetaan mutu pendidikan yang terintegrasi dengan Dapodik, sehingga baik sekolah maupun pihak-pihak terkait focus dalam memfasilitasi pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan

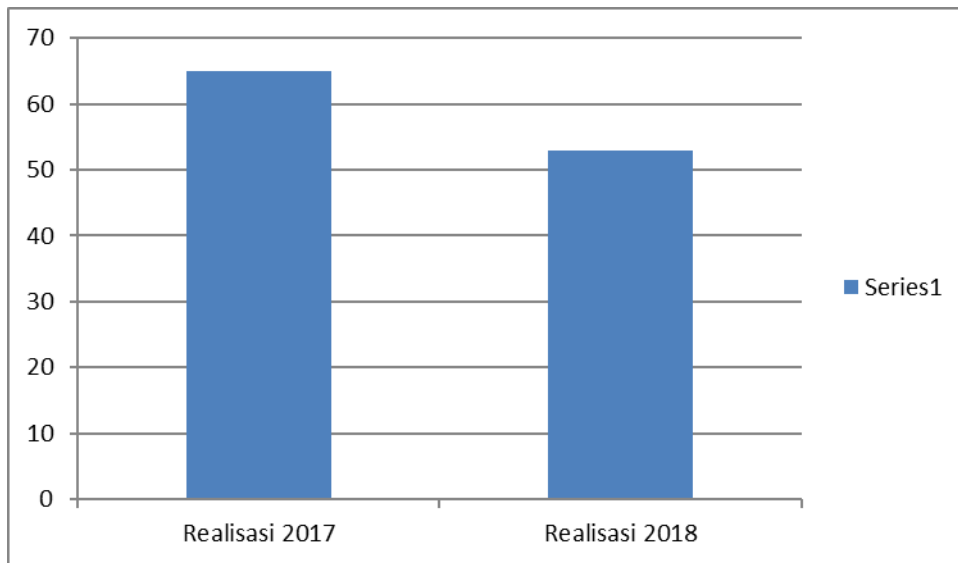
Pencapaiankinerjatersebut dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Target renstra tahun 2018 belum tercapai jika dibanding dengan tahun 2017, target SMA yang telah dipetakan mengalami penurunan. Tahun 2017 jumlah SMA yang dipetakan sebanyak 65 sekolah, sedangkan pada tahun 2018 sejumlah 53 sekolah.

Berikut adalah gambar perbandingan capaian tahun 2017 dan 2018

Gambar3.9 : Perbandingan jumlah SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya



Hasil dari pelaksanaan Program tersebut adalah sebagai berikut.

a) Gambaran Umum Capaian SNP

Dari 53 sekolah yang dipetakan mutunya, sebanyak 53 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul di server pusat. Standar yang akan diolah dalam peta capaian mutu ini adalah :

- 1) Standar Kompetensi Lulusan;
- 2) Standar Isi;
- 3) Standar Proses;
- 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 5) Standar Sarana dan Prasarana;
- 6) Standar Pengelolaan;
- 7) Standar Pembiayaan Pendidikan;
- 8) Standar Penilaian Pendidikan.

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0–7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

- 1) Menuju SNP level 1 : skor <2,04
- 2) Menuju SNP level 2 : $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
- 3) Menuju SNP level 3 : $3,70 \leq \text{skor} < 5,06$
- 4) Menuju SNP level 4 : $5,06 \leq \text{skor} < 6,66$
- 5) SNP : $6,66 \leq \text{skor} \leq 7,0$

Skor peta capaian mutu jenjang SMA untuk masing-masing kabupaten/kota dipaparkan pada tabel 3.10 dibawah ini.

Tabel 3.10. Skor Peta Capaian SNP Jenjang SMA di Kep Babel
Tahun 2018

Kab/Kota	Skor Rata-rata	Keterangan
Kota Pangkalpinang	5,73	Menuju SNP 4
Kab. Bangka	5,49	Menuju SNP 4
Kab. Bangka Tengah	5,57	Menuju SNP 4
Kab. Bangka Barat	5,81	Menuju SNP 4
Kab. Bangka Selatan	5,79	Menuju SNP 4
Kab. Belitung	5,84	Menuju SNP 4
Kab. Belitung Timur	5,46	Menuju SNP 4
Rata-rata	5,59	Menuju SNP 4

Berdasarkan data pada Tabel 3.10 dapat diketahui bahwa capaian mutu SNP jenjang SMA di 7 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan Menuju SNP 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan jenjang SMA di Kepulauan Bangka Belitung belum mencapai SNP.

b) Capaian SNP untuk Setiap Standar

Skor capaian mutu jenjang SMA di Kepulauan Babel untuk masing-masing standar dipaparkan pada tabel 3.11 dibawah ini.

Tabel 3.11 Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SMA di Kep Babel
Tahun 2018

Standar	Skor Rata-rata	Keterangan
Standar Kompetensi Lulusan	6,59	Menuju SNP 4
Standar Isi	5,52	Menuju SNP 4
Standar Proses	6,48	Menuju SNP 4
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,67	Menuju SNP 2

Standar Sarana dan Prasarana	4,65	Menuju SNP 4
Standar Pengelolaan	5,87	Menuju SNP 4
Standar Pembiayaan Pendidikan	5,85	Menuju SNP 4
Standar Penilaian Pendidikan	6,07	Menuju SNP 4
Rata-rata	5,58	Menuju SNP 4

Berdasarkan tabel 3.11 dapat diketahui bahwa capaian mutu jenjang SMA di Kepulauan Babel secara umum belum mencapai SNP. Capaian mutu yang paling baik adalah pada standar Kompetensi Lulusan dengan skor mutu 6,59 dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan skor mutu 3,67.

Perbandingan Capaian SNP Provinsi Kep Babel Tahun 2017 dan 2018

No	Capaian SNP	Jumlah Sekolah Tahun 2017	Persentase Jumlah Sekolah Tahun 2017	Jumlah Sekolah Tahun 2018	Persentase Jumlah Sekolah Tahun 2018
1	Menuju SNP level 1 : skor < 2,04	0	0%	1	1,87%
2	Menuju SNP level 2 : 2,04 < skor < 3,70	1	1,53%	0	0%
3	Menuju SNP level 3 : 3,70 < skor < 5,06	18	27,69%	3	5,66%
4	Menuju SNP level 4 : 5,06 < skor < 6,66	46	70,76%	49	92,45%
5	SNP : 6,66 < skor < 7,0	0	0%	0	0%
	Jumlah	65	100%	53	100%

c) Hambatan dan kendala

Kendala:

1. Petugas pemetaan khususnya untuk Pengawas masih sulit untuk memahami pemetaan yang berbasis IT (online) karena pengetahuan tentang IT kurang.

Solusi:

Mendampingi Pengawas dengan operator dalam pembelajaran dikelas.

2. Terdapat data yang tidak lengkap setelah dilakukan validasi dan verifikasi pada aplikasi PMP.

Solusi:

Mendampingkan Pengawas dengan operator dalam validasi data satuan pendidikan.

d) Langkah antisipasi yang dilakukan kedepan

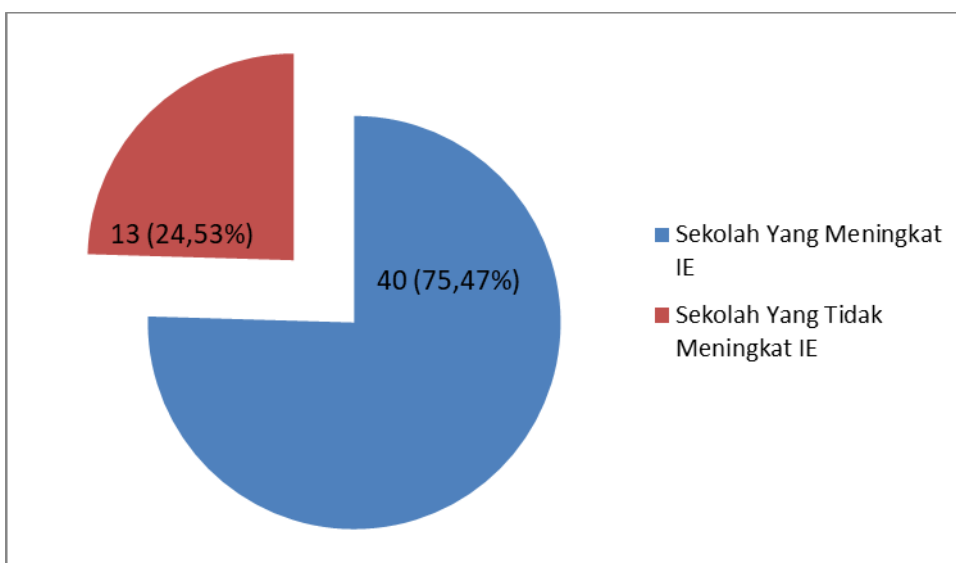
Untuk memecahkan kendala di atas, hal yang harus dilakukan adalah: Pertama, perlu penyempurnaan aplikasi pemetaan mutu dan pengurangan jumlah pertanyaan pada kuisioner, sehingga sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana komputer tetap bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa mengalami kendala berarti. Kedua, server pusat sebaiknya lebih disiapkan kinerjanya untuk menerima data dari seluruh sekolah di Indonesia. Ketiga, kedepan disamping melatih pengawas, operator sekolah juga dilatih tentang penggunaan aplikasi PMP.



6. Persentase SMA yang meningkat Indeks Efektivitasnya di Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan rerata capaian Standar Nasional Pendidikan sejumlah 53 sekolah jenjang SMA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, sebanyak 40 sekolah mengalami kenaikan rerata capaian SNP atau sebesar 75,47%.

Secara visual persentase SMA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meningkat indeks efektivitasnya dapat di lihat pada gambar berikut :



Tabel 3.12 Perbandingan SMA di Provinsi Kep Babel yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya



7. Persentase SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Kepulauan Babel

Indikator kinerja Satuan Pendidikan telah dipetakan mutunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian indikatornya sebesar 68,57% atau sejumlah 48 SMK dari target renstra. Target renstra 70 SMK.

Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu:

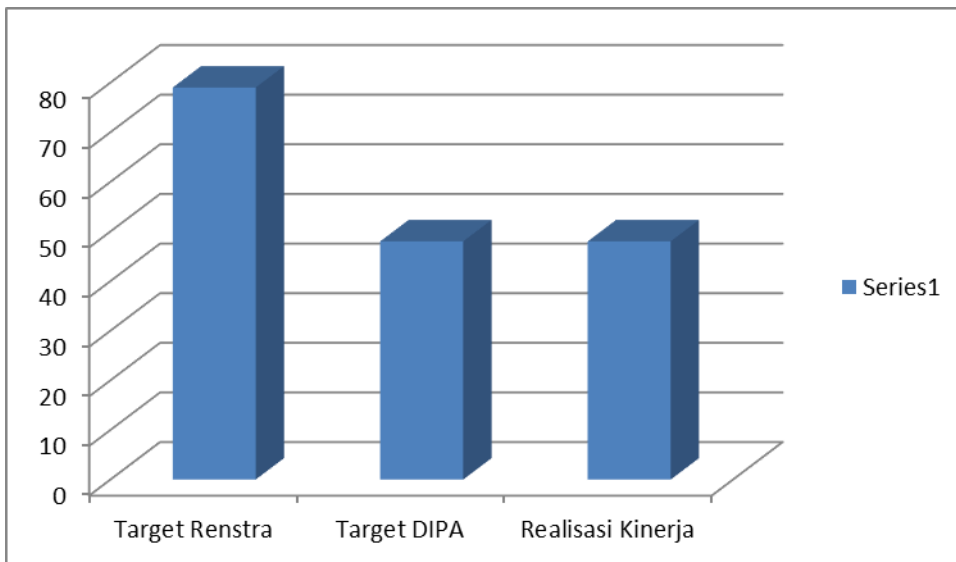
1. Fungsi koordinasi berjalan dengan baik antara LPMP Kepulauan Bangka Belitung dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
2. Adanya strategi pencapaian dengan melibatkan unsur diluar LPMP yaitu pengawas diseluruh kabupaten/kota dan dinas pendidikan kabupaten/kota

Jika dibandingkan dengan target yang tercantum pada DIPA indikator kinerja persentase SMK telah dipetakan mutu pendidikannya di Kep Babel sudah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 48 SMK dari target sejumlah 48 SMK dengan capaian 100%.

Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini melalui surat edaran Ditjen Dikdasmen Kemdikbud mengeluarkan kebijakan tentang pemetaan data mutu kepada seluruh sekolah.
2. Dalam rangka pemetaan mutu pendidikan ,seluruh sekolah wajib melakukan pemetaan melalui aplikasi pemetaan mutu pendidikan yang terintegrasi dengan Dapodik, sehingga baik sekolah maupun pihak-pihak terkait focus dalam memfasilitasi pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan

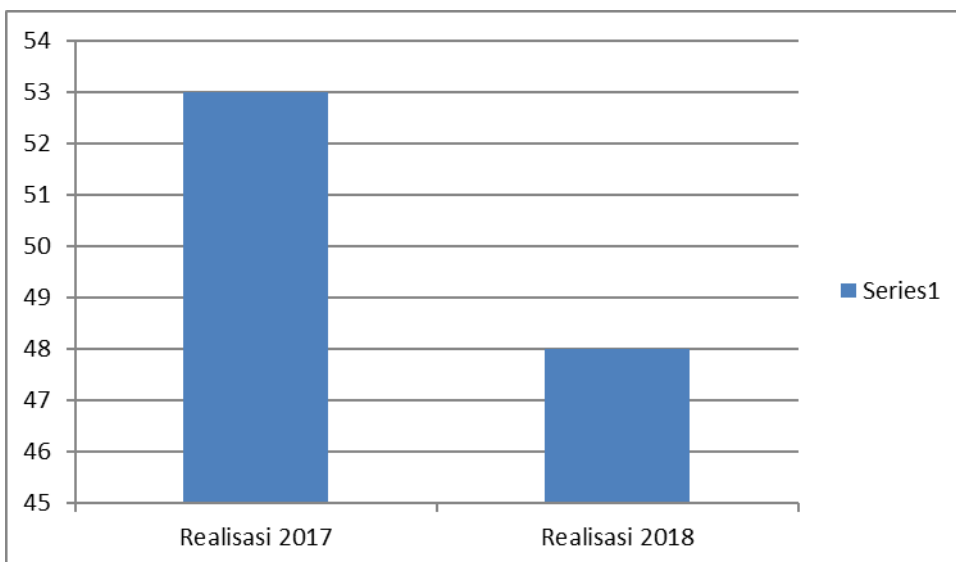
Pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Target renstra tahun 2018 belum tercapai jika dibanding dengan tahun 2017, target SMK yang telah dipetakan mengalami penurunan sejumlah 5 SMK. Tahun 2017 jumlah SMK yang dipetakan sebanyak 53 SMK, sedangkan pada tahun 2018 sejumlah 48 SMK.

Berikut adalah gambar perbandingan capaian tahun 2017 dan 2018

Gambar 3.13 : Perbandingan jumlah SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya



Hasil dari pelaksanaan Program tersebut adalah sebagai berikut.

a) Gambaran Umum Capaian SNP

Dari 48 SMK yang dipetakan mutunya, sebanyak 48 SMK yang dapat diolah peta mutunya. Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul di server pusat. Standar yang akan diolah dalam peta capaian mutu ini adalah:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan;
- 2) Standar Isi;
- 3) Standar Proses;
- 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 5) Standar Sarana dan Prasarana;
- 6) Standar Pengelolaan;
- 7) Standar Pembiayaan Pendidikan;
- 8) Standar Penilaian Pendidikan.

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0–7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

- 1) Menuju SNP level 1 : skor $< 2,04$
- 2) Menuju SNP level 2 : $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
- 3) Menuju SNP level 3 : $3,70 \leq \text{skor} < 5,06$
- 4) Menuju SNP level 4 : $5,06 \leq \text{skor} < 6,66$
- 5) SNP : $6,66 \leq \text{skor} \leq 7,0$

Skor peta capaian mutu jenjang SMK untuk masing-masing kabupaten/kota dipaparkan pada tabel 3.14 dibawah ini.

Tabel 3.14 Skor Peta Capaian SNP Jenjang SMK di Kep Babel
Tahun 2018

Kab/Kota	Skor Rata-rata	Keterangan
Kota Pangkalpinang	5,61	Menuju SNP 4
Kab. Bangka	5,37	Menuju SNP 4
Kab. Bangka Tengah	5,36	Menuju SNP 4
Kab. Bangka Barat	5,02	Menuju SNP 4
Kab. Bangka Selatan	5,26	Menuju SNP 4
Kab. Belitung	5,42	Menuju SNP 4
Kab. Belitung Timur	4,14	Menuju SNP 4
Rata-rata	5,31	Menuju SNP 4

Berdasarkan data pada Tabel 3.14 dapat diketahui bahwa capaian mutu SNP jenjang SMK di 7 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan Menuju SNP 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan jenjang SMK di Kep Babel belum mencapai SNP.

b) Capaian SNP untuk Setiap Standar

Skor capaian mutu jenjang SMK di Kep Babel untuk masing-masing standar dipaparkan pada tabel 3.15 dibawah ini.

Tabel 3.15 Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SMK di Kep Babel
Tahun 2018

Standar	Skor Rata-rata	Keterangan
Standar Kompetensi Lulusan	6.40	Menuju SNP 4
Standar Isi	5.55	Menuju SNP 4
Standar Proses	6.42	Menuju SNP 4
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.46	Menuju SNP 2
Standar Sarana dan Prasarana	3.14	Menuju SNP 2
Standar Pengelolaan	5.76	Menuju SNP 4
Standar Pembiayaan Pendidikan	5.77	Menuju SNP 4
Standar Penilaian Pendidikan	6,00	Menuju SNP 4
Rata-rata	5,31	Menuju SNP 4

Berdasarkan tabel 3.15 dapat diketahui bahwa capaian mutu jenjang SMK di Kep Babel secara umum belum mencapai SNP. Capaian mutu yang paling baik adalah pada standar Kompetensi Lulusan dengan skor mutu 6,40 dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar Sarana dan Prasarana dengan skor mutu 3,14.

Perbandaingan Capaian SNP Provinsi Kep Babel Tahun 2017 dan 2018

No	Capaian SNP	Jumlah Sekolah Tahun 2017	Persentase Jumlah Sekolah Tahun 2018	Jumlah Sekolah Tahun 2017	Persentase Jumlah Sekolah Tahun 2018
1	Menuju SNP level 1 : skor < 2,04	0	0%	0	0%
2	Menuju SNP level 2 : 2,04 < skor < 3,70	3	5,66%	0	0%
3	Menuju SNP level 3 : 3,70 < skor < 5,06	15	28,30%	9	18,75%
4	Menuju SNP level 4 : 5,06 < skor < 6,66	35	66,03%	39	81,25%
5	SNP : 6,66 < skor < 7,0	0	0%	0	0%
	Jumlah	53	100%	48	100%

c) Hambatan dan kendala

Kendala:

1. Petugas pemetaan khususnya untuk Pengawas masih sulit untuk memahami pemetaan yang berbasis IT (online) karena pengetahuan tentang IT kurang.

Solusi:

Mendampingi Pengawas dengan operator dalam pembelajaran dikelas.

2. Terdapat data yang tidak lengkap setelah dilakukan validasi dan verifikasi pada aplikasi PMP.

Solusi:

Mendampingi Pengawas dengan operator dalam validasi data satuan pendidikan.

d) Langkah antisipasi yang dilakukan kedepan

Untuk memecahkan kendala di atas, hal yang harus dilakukan adalah: Pertama, perlu penyempurnaan aplikasi

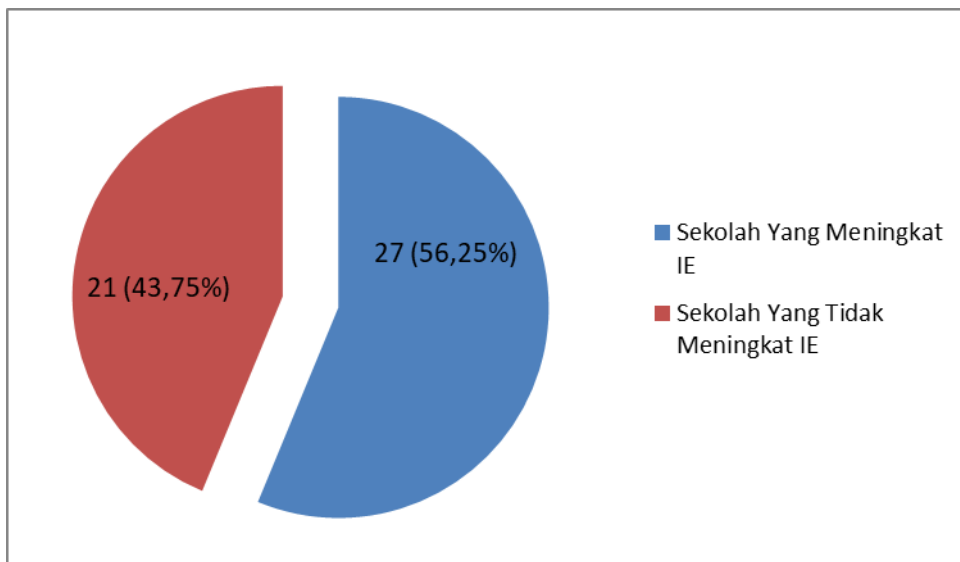
pemetaan mutu dan pengurangan jumlah pertanyaan pada kuisisioner, sehingga sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana komputer tetap bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa mengalami kendala berarti. Kedua, server pusat sebaiknya lebih disiapkan kinerjanya untuk menerima data dari seluruh sekolah di Indonesia. Ketiga, ke depan disamping melatih pengawas, operator sekolah juga dilatih tentang penggunaan aplikasi PMP.



8. Persentase SMK yang meningkat Indeks Efektivitasnya di Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan rerata capaian Standar Nasional Pendidikan sejumlah 48 sekolah jenjang SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, sebanyak 27 sekolah mengalami kenaikan rerata capaian SNP atau sebesar 56,25%.

Secara visual persentase SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meningkat indeks efektivitasnya dapat di lihat pada gambar berikut :



Gambar 3.16 Perbandingan SMK di Provinsi Kep Babel yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya



9. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Indikator kinerja persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP telah terealisasi sebesar 80 sekolah dari target 80 sekolah dengan persentase capaian 100%. Persentase capaian realisasi kegiatan dapat tercapai karena ada beberapa penyebab. Penyebab tersebut adalah : a) realisasi kegiatan SPMI adalah 80 sekolah; b) realisasi program sekolah model sebanyak 80 sekolah; c) kecukupan anggaran untuk melakukan kegiatan fasilitasi di sekolah jenjang SD; dan e) fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kota yang berjalan dengan baik.

Pada tahun 2017 realisasi indikator persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP adalah 80 sekolah. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 80 sekolah. Ini berarti tidak ada peningkatan jumlah sekolah sebagaimana dalam gambar dibawah ini.



Capaian Realisasi tersebut pada pelaksanaannya di tunjang dengan beberapa kegiatan yaitu :

- a) Pengembangan Sekolah Dasar (SD) berbasis SNP melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Verifikasi Sekolah Model, Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Sekolah Model, Bimbingan Teknis SPMI yang meliputi kegiatan Pendampingan LPMP ke lokasi Bimbingan Teknis SPMI, Pendampingan sekolah model, serta Monitoring dan Evaluasi yang meliputi Monitoring dan Evaluasi Sekolah Model. Dari 80 SD yang telah difasilitasi

berdasarkan 8 SNP telah terealisasi sejumlah 80 SD dengan capaian sebesar 100%.

- b) Sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya terdiri dari Sosialisasi Sekolah Model dan Sekolah Imbas, Bimbingan Teknis SPME, Monitoring dan Evaluasi, Diseminasi Hasil. Pada tahun 2018 jumlah sekolah model yang dikembangkan mutu pendidikannya adalah sejumlah 80 sekolah dari target 80 sekolah dengan capaian 100% dengan perincian 11 sekolah tiap kabupaten/kota. Pada tahun 2017 jumlah sekolah model yang dikembangkan mutu pendidikannya adalah sejumlah 80 sekolah dari target 80 sekolah dengan capaian 100% dengan perincian 11 sekolah tiap kabupaten kota.

e) Hambatan dan kendala

Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program adalah:

- 1) Jumlah data yang tidak sama antara data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Dikdasmen dengan data yang diperoleh dari dinas pendidikan Kabupaten/Kota
- 2) Permasalahan yang muncul dimasing-masing kabupaten/kota yang berbeda-beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan pedoman yang ada

f) Langkah antisipasi yang dilakukan kedepan

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

- 1) Perlu adanya sinkronisasi data lebih awal antara dinas kabupaten/kota dengan LPMP Kepulauan Bangka Belitung beserta Direktorat Jenderal Dikdasmen
- 2) Berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan dinas pendidikan kabupaten/kota

Berdasarkan permasalahan di tahun 2018, rekomendasi yang diusulkan untuk menyelenggarakan program fasilitasi ditahun 2019 adalah:

1. Perlu adanya sinkronisasi data lebih awal antara dinas kabupaten/kota dengan LPMP Kepulauan Bangka Belitung beserta Direktorat Jenderal Dikdasmen
2. Direktorat Jenderal Dikdasmen membuat pedoman penyelenggaraan yang baku mengenai penyelenggaraan fasilitasi sebelum program fasilitasi

berjalan, sehingga perubahan saat kegiatan berlangsung dapat diminimalkan.



10. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Indikator kinerja persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP telah terealisasi sebesar 26 sekolah dari target 26 sekolah dengan persentase capaian 100%. Persentase capaian realisasi kegiatan dapat tercapai karena ada beberapa penyebab. Penyebab tersebut adalah: a) realisasi kegiatan SPMI adalah 26 sekolah; b) realisasi program sekolah model sebanyak 26 sekolah; c) kecukupan anggaran untuk melakukan kegiatan fasilitasi di sekolah jenjang SMP; dan e) fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kota yang berjalan dengan baik.

Pada tahun 2017 realisasi indikator persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP adalah 26 sekolah. Pada tahun 2018 sebanyak 26 sekolah. Ini berarti tidak ada peningkatan jumlah Sekolah sebagaimana dalam gambar dibawah ini



Capaian Realisasi tersebut pada pelaksanaannya di tunjang dengan beberapa kegiatan yaitu :

- a) Pengembangan SMP berbasis SNP melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Verifikasi Sekolah Model, Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Sekolah Model, Bimbingan Teknis SPMI yang meliputi kegiatan Pendampingan LPMP ke lokasi Bimbingan Teknis SPMI, Pendampingan sekolah model, serta Monitoring dan Evaluasi yang meliputi Monitoring dan Evaluasi Sekolah Model. Dari 26 SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP telah terealisasi sejumlah 26 SMP dengan capaian sebesar 100%.
- b) Sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya terdiri dari Sosialisasi Sekolah Model dan Sekolah Imbas, Bimbingan Teknis SPME, Monitoring dan Evaluasi, Diseminasi Hasil. Pada tahun 2018 jumlah sekolah model yang dikembangkan mutu pendidikannya adalah sejumlah 26 sekolah dari target 26 sekolah dengan capaian 100% dengan perincian 4 sekolah tiap kabupaten kota. Pada tahun 2017 jumlah sekolah model yang dikembangkan mutu pendidikannya adalah sejumlah 26 sekolah dari target 26 sekolah dengan capaian 100% dengan perincian 4 sekolah tiap kabupaten kota

e) Hambatan dan kendala

Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program adalah:

- 1) Jumlah data yang tidak sama antara data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Dikdasmen dengan data yang diperoleh dari dinas pendidikan Kabupaten/Kota
- 2) Permasalahan yang muncul dimasing-masing kabupaten/kota yang berbeda-beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan pedoman yang ada

f) Langkah antisipasi yang dilakukan kedepan

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

- 1) Perlu adanya sinkronisasi data lebih awal antara dinas kabupaten/kota dengan LPMP Kepulauan Bangka Belitung beserta Direktorat Jenderal Dikdasmen
- 2) Berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan dinas pendidikan kabupaten/kota

Berdasarkan permasalahan di tahun 2018, rekomendasi yang diusulkan untuk menyelenggarakan program fasilitasi di tahun 2019 adalah:

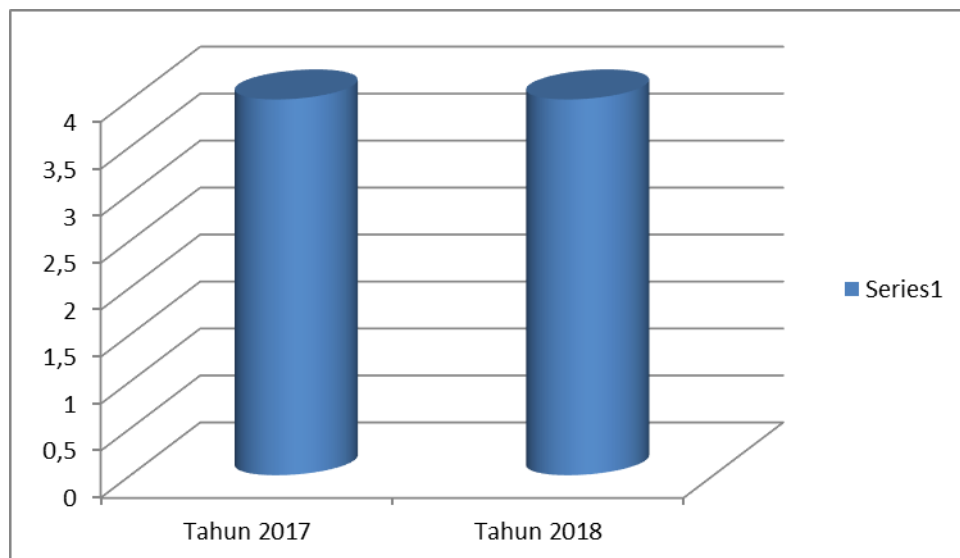
1. Perlu adanya sinkronisasi data lebih awal antara dinas kabupaten/kota dengan LPMP Kepulauan Bangka Belitung beserta Direktorat Jenderal Dikdasmen
2. Direktorat Jenderal Dikdasmen membuat pedoman penyelenggaraan yang baku mengenai penyelenggaraan fasilitasi sebelum program fasilitasi berjalan, sehingga perubahan saat kegiatan berlangsung dapat diminimalkan



11. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Indikator kinerja persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP telah terealisasi sebesar 4 sekolah dari target 4 sekolah dengan persentase capaian 100%. Persentase capaian realisasi kegiatan dapat tercapai karena ada beberapa penyebab. Penyebab tersebut adalah : a) realisasi kegiatan SPMI adalah 4 sekolah; b) realisasi program sekolah model sebanyak 4 sekolah; c) kecukupan anggaran untuk melakukan kegiatan fasilitasi di sekolah jenjang SMA; dan e) fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kota yang berjalan dengan baik.

Pada tahun 2017 realisasi indikator persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP adalah 4 sekolah. Pada tahun 2018 sebanyak 4 sekolah. Ini berarti tidak ada peningkatan jumlah sekolah sebagaimana dalam gambar dibawah ini.



Capaian Realisasi tersebut pada pelaksanaannya di tunjang dengan beberapa kegiatan yaitu :

- a) Pengembangan SMA berbasis SNP melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Verifikasi Sekolah Model, Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Sekolah Model, Bimbingan Teknis SPMI yang meliputi kegiatan Pendampingan LPMP ke lokasi Bimbingan Teknis SPMI, Pendampingan sekolah model, serta Monitoring dan Evaluasi yang meliputi Monitoring dan Evaluasi Sekolah Model. Dari 4 SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8SNP telah terealisasi sejumlah 4 SMA dengan capaian sebesar 100%.
- b) Sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya terdiri dari Sosialisasi Sekolah Model dan Sekolah Imbas, Bimbingan Teknis SPME, Monitoring dan Evaluasi, Diseminasi Hasil. Pada tahun 2018 jumlah sekolah model yang dikembangkan mutu pendidikannya adalah sejumlah 4 sekolah dari target 4 sekolah dengan capaian 100% dengan perincian 1 sekolah tiap kabupaten kota. Pada tahun 2017 jumlah sekolah model yang dikembangkan mutu pendidikannya adalah sejumlah 4 sekolah dari target 4 sekolah dengan capaian 100% dengan perincian 1 sekolah tiap kabupaten kota.

e) Hambatan dan kendala

Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program adalah:

- 1) Jumlah data yang tidak sama antar data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Dikdasmen dengan data yang diperoleh dari dinas pendidikan Kabupaten/Kota
- 2) Permasalahan yang muncul di masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan pedoman yang ada

f) Langkah antisipasi yang dilakukan kedepan

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

- 1 Perlu adanya sinkronisasi data lebih awal antara dinas kabupaten/kota dengan LPMP Kepulauan Bangka Belitung beserta Direktorat Jenderal Dikdasmen
- 2 Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota

Berdasarkan permasalahan ditahun 2018, rekomendasi yang diusulkan untuk menyelenggarakan program fasilitasi ditahun 2019 adalah:

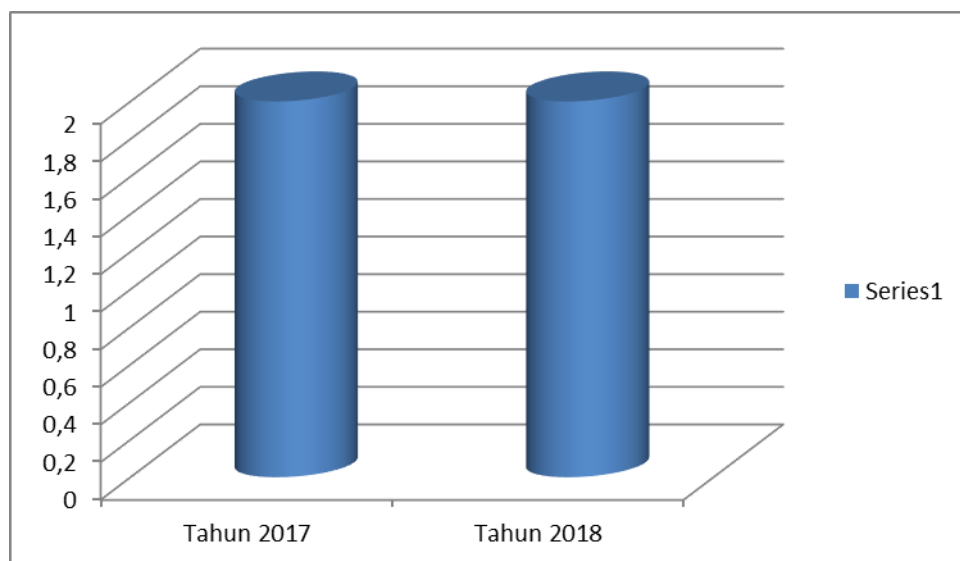
1. Perlu adanya sinkronisasi data lebih awal antara dinas kabupaten/kota dengan LPMP Kepulauan Bangka Belitung beserta Direktorat Jenderal Dikdasmen
2. Direktorat Jenderal Dikdasmen membuat pedoman penyelenggaraan yang baku mengenai penyelenggaraan fasilitasi sebelum program fasilitasi berjalan, sehingga perubahan saat kegiatan berlangsung dapat diminimalkan



12. SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Indikator kinerja persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP telah terealisasi sebesar 2 sekolah dari target 2 sekolah dengan persentase capaian 100%. Persentase capaian realisasi kegiatan dapat tercapai karena ada beberapa penyebab. Penyebab tersebut adalah : a) realisasi kegiatan SPMI adalah 2 sekolah; b) realisasi program sekolah model sebanyak 2 sekolah; c) kecukupan anggaran untuk melakukan kegiatan fasilitasi di sekolah jenjang SMK; dan e) fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kota yang berjalan dengan baik.

Pada tahun 2017 realisasi indikator persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP adalah 2 sekolah. Pada tahun 2018 sebanyak 2 sekolah. Ini berarti tidak ada peningkatan jumlah sekolah sebagaimana dalam gambar dibawah ini.



Capaian Realisasi tersebut pada pelaksanaannya di tunjang dengan beberapa kegiatan yaitu :

- a) Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis SNP melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Verifikasi Sekolah Model, Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Sekolah Model, Bimbingan Teknis SPMI yang meliputi kegiatan Pendampingan LPMP ke lokasi Bimbingan Teknis SPMI, Pendampingan sekolah model, serta Monitoring dan Evaluasi yang meliputi Monitoring dan Evaluasi Sekolah Model. Dari 2 SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP telah terealisasi sejumlah 2 SMK dengan capaian sebesar 100%.
- b) Sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya terdiri dari Sosialisasi Sekolah Model dan Sekolah Imbas, Bimbingan Teknis SPME, Monitoring dan Evaluasi, Diseminasi Hasil. Pada tahun 2018 jumlah sekolah model yang dikembangkan mutu pendidikannya adalah sejumlah 2 sekolah dari target 2 sekolah dengan capaian 100% dengan perincian 1 sekolah tiap kabupaten kota. Pada tahun 2017 jumlah sekolah model yang dikembangkan mutu pendidikannya adalah sejumlah 2 sekolah dari target 2 sekolah dengan capaian 100% dengan perincian 1 sekolah tiap kabupaten kota.

e) Hambatan dan kendala

Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program adalah:

- 1) Permasalahan yang muncul dimasing-masing kabupaten/kota yang berbeda- beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan pedoman yang ada

f) Langkah antisipasi yang dilakukan kedepan

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

- 1. Perlu adanya sinkronisasi data lebih awal antara dinas kabupaten/kota dengan LPMP Kepulauan Bangka Belitung beserta Direktorat Jenderal Dikdasmen
- 2. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota

Berdasarkan permasalahan ditahun 2018, rekomendasi yang diusulkan untuk menyelenggarakan program fasilitasi ditahun 2019 adalah:

1. Perlu adanya sinkronisasi data lebih awal antara dinas kabupaten/kota dengan LPMPKepulauan Bangka Belitung beserta Direktorat Jenderal Dikdasmen
2. Direktorat Jenderal Dikdasmen membuat pedoman penyelenggaraan yang baku mengenai penyelenggaraan fasilitasi sebelum program fasilitasi berjalan, sehingga perubahan saat kegiatan berlangsung dapat diminimalkan



13. SD yang melaksanakan Kurikulum 2013

Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD didukung dengan kegiatan berikut :

- Bimtek Tim Pengembang tingkat Kabupaten/Kota,
- Pendampingan Kurikulum 2013,
- Rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
- Sosialisasi Bantuan Pendampingan Sekolah Pelaksanaan Kurikulum 2013
- Monitoring Evaluasi.

Berikut capaian kegiatan implementasi Kurikulum 2013 :

- Bimtek Tim Pengembang tingkat Kabupaten/Kota

Jenjang	Tanggal Pelaksanaan	Peserta		Tempat Pelaksanaan
		Kuota	Realisasi	
SD	19 s.d. 21 Maret 2018	41 orang	40 orang	LPMP Kep Babel

Bimtek ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan (updating) Instruktur Kurikulum 2013 jenjang Sekolah Dasar dengan perkembangan kebijakan dan peraturan yang baru.

Peserta kegiatan ini adalah pengawas sekolah yang pernah mengikuti bimbingan teknis implementasi kurikulum tahun sebelumnya yang akan melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 pada sekolah sasaran tahun 2018.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dengan pola 20 jpl @ 60 menit dengan fasilitator Instruktur Kurikulum yang sudah mengikuti Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD Tingkat Nasional.

➤ Faktor-faktor keberhasilan kegiatan

- Persentase kehadiran peserta adalah secara keseluruhan diatas 90%, peserta tidak hadir karena berbagai alasan kepentingan.
- Kegiatan berjalan lancar selama 3 hari dengan pola 20 jpl

➤ Faktor-faktor kendala kegiatan

- Adanya peserta yang belum hadir / datang terlambat.

➤ Rekomendasi/catatan untuk peningkatan kualitas kegiatan

1). Bagi Direktorat SD

Agar LPMP dan Dinas Pendidikan Kab/Kota dilibatkan dalam penyusunan strategi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana baik sesuai kebutuhan.

2). Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

- Agar informasi tentang pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat segera disampaikan kepada seluruh komponen yang berkepentingan untuk dapat ditindaklanjuti dengan baik sehingga tujuan, sasaran dan hasil yang diharapkan dapat tercapai.
- Agar peserta pelatihan yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tidak diberikan tugas lainnya pada saat mengikuti pelatihan sehingga peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dari awal hingga akhir.

3). Bagi LPMP Kepulauan Bangka Belitung

- Penjadwalan kegiatan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .
- Pemanfaatan website LPMP Kepulauan Bangka Belitung untuk penyebaran informasi kegiatan.

➤ Sosialisasi Bantuan Pendampingan Sekolah Pelaksanaan Kurikulum 2018

Jenjang	Tanggal Pelaksanaan	Peserta		Tempat Pelaksanaan
		Kuota	Realisasi	
SD	26 s.d. 27 Agustus 2018	46 orang	40 orang	LPMP Kep Babel

Penyaluran Bantuan Pemerintah merupakan program pendukung pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 kepada Sekolah Sasaran yang ditetapkan menjadi Sekolah Inti/ Induk Kluster pada Tahun 2018. Jumlah Bantuan Pemerintah pada tiap-tiap jenjangnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dari direktorat masing-masing. Dana bantuan pemerintah ini bersumber dari APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPMP Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2018 Bantuan Pemerintah Pendampingan Sekolah Pelaksanaan Kurikulum 2013 disalurkan kepada 277 sekolah sasaran melalui 40 Induk Kluster.

Jangka waktu penggunaan dana bantuan pemerintah mulai dari diterimanya dana s.d. Bulan Desember 2018.

Tahapan penyaluran bantuan meliputi :

- Asistensi bantuan dengan produk Proposal Pendampingan di induk kluster
- Monitoring penggunaan bantuan dan pelaksanaan pendampingan
- Evaluasi dan pelaporan bantuan

➤ Faktor-faktor keberhasilan kegiatan

- Penyaluran bantuan disalurkan sesuai jadwal
- Terlaksananya pendampingan di sekolah induk dan anggota kluster sesuai jadwal
- Tersusunnya laporan pendampingan sesuai jadwal

➤ Faktor-faktor kendala kegiatan

- Ketidaksiapan calon penerima bantuan untuk menjadi sekolah sasaran
- Tim Pendamping tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dikarenakan kesulitan mendapatkan ijin dari kepala sekolah yang bersangkutan
- Kurangnya koordinasi sekolah sasaran dengan tim pendamping
- Kurangnya pemahaman sekolah sasaran dalam pembuatan pertanggungjawaban penggunaan bantuan

➤ Rekomendasi/catatan untuk peningkatan kualitas kegiatan

- Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat SD dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait juknis pengelolaan bantuan dan jadwal kegiatan

- Penambahan waktu pelaksanaan dan unsur yang diundang (Kepala Sekolah dan Bendahara untuk seluruh sekolah sasaran) pada saat kegiatan Asistensi
 - Adanya pendataan Rombel Sekolah Sasaran terkait kebutuhan Tim Pendamping
- Rekomendasi/catatan untuk peningkatan kualitas kegiatan
- Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat SD dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota terkait juknis pengelolaan bantuan dan pendampingan terkait jadwal kegiatan
 - Menambah jumlah Tim Pendamping agar tidak terlalu meninggalkan tugas mengajarnya.
- Adanya pendataan Rombel Sekolah Sasaran terkait kebutuhan Tim Pendamping
- Sekolah Inti/induk kluster dapat melaksanakan kegiatan pendampingan sesuai dengan proposal dan RAB yang telah disusun bersama kepala sekolah induk kluster, dan disetujui oleh LPMP Kepulauan Bangka Belitung.
 - Sekolah Inti/Induk Kluster dapat menyusun Laporan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan Proposal dan RAB yang telah disepakati bersama.



14. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013

Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMP didukung dengan kegiatan berikut :

- Bimtek Tim Pengembang tingkat Kabupaten/Kota,
- Pendampingan Kurikulum 2013,
- Sosialisasi Bantuan Pendampingan Sekolah Pelaksanaan Kurikulum 2013
- Monitoring Evaluasi.

Berikut capaian kegiatan implementasi Kurikulum 2013 :

- Bimtek Tim Pengembang tingkat Kabupaten/Kota

Jenjang	Tanggal Pelaksanaan	Peserta		Tempat Pelaksanaan
		Kuota	Realisasi	
SMP	14 s.d. 16 Maret 2018	93 orang	83 orang	LPMP Kep Babel

Bimtek ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan (updating) Instruktur Kurikulum 2013 jenjang SMP dengan perkembangan kebijakan dan peraturan yang baru.

Peserta kegiatan ini adalah guru mata pelajaran yang pernah mengikuti bimbingan teknis implementasi kurikulum tahun sebelumnya yang akan melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 pada sekolah sasaran tahun 2018.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dengan pola 20 jpl @ 60 menit dengan fasilitator Instruktur Kurikulum yang sudah mengikuti Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 SMP Tingkat Nasional.

➤ Faktor-faktor keberhasilan kegiatan

- Persentase kehadiran peserta adalah secara keseluruhan diatas 80%, peserta tidak hadir karena berbagai alasan kepentingan.
- Kegiatan berjalan lancar selama 3 hari dengan pola 20 jpl

➤ Faktor-faktor kendala kegiatan

- Adanya peserta yang belum hadir / datang terlambat.

➤ Rekomendasi/catatan untuk peningkatan kualitas kegiatan

1). Bagi Direktorat SMP

Agar LPMP dan Dinas Pendidikan Kab/Kota dilibatkan dalam penyusunan strategi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana baik sesuai kebutuhan.

2). Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

- Agar informasi tentang pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat segera disampaikan kepada seluruh komponen yang berkepentingan untuk dapat ditindaklanjuti dengan baik sehingga tujuan, sasaran dan hasil yang diharapkan dapat tercapai.
- Agar peserta pelatihan yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tidak diberikan tugas lainnya pada saat mengikuti pelatihan sehingga peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dari awal hingga akhir.

3). Bagi LPMP Kepulauan Bangka Belitung

- Penjadwalan kegiatan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .

- Pemanfaatan website LPMP Kepulauan Bangka Belitung untuk penyebaran informasi kegiatan.

➤ Sosialisasi Bantuan Pendampingan Sekolah Pelaksanaan Kurikulum 2018

Jenjang	Tanggal Pelaksanaan	Peserta		Tempat Pelaksanaan
		Kuota	Realisasi	
SMP	26 s.d. 27 Agustus 2018	30 orang	20 orang	LPMP Kep Babel

Penyaluran Bantuan Pemerintah merupakan program pendukung pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 kepada Sekolah Sasaran yang ditetapkan menjadi Sekolah Inti/ Induk Kluster pada Tahun 2018. Jumlah Bantuan Pemerintah pada tiap-tiap jenjangnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dari direktorat masing-masing. Dana bantuan pemerintah ini bersumber dari APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPMP Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2018 Bantuan Pemerintah Pendampingan Sekolah Pelaksanaan Kurikulum 2013 disalurkan kepada 87 sekolah sasaran melalui 20 Induk Kluster.

Jangka waktu penggunaan dana bantuan pemerintah mulai dari diterimanya dana s.d. Bulan Desember 2018.

Tahapan penyaluran bantuan meliputi :

- Asistensi bantuan dengan produk Proposal Pendampingan di induk kluster
- Monitoring penggunaan bantuan dan pelaksanaan pendampingan
- Evaluasi dan pelaporan bantuan

➤ Faktor-faktor keberhasilan kegiatan

- Penyaluran bantuan disalurkan sesuai jadwal
- Terlaksananya pendampingan di sekolah induk dan anggota kluster sesuai jadwal
- Tersusunnya laporan pendampingan sesuai jadwal

➤ Faktor-faktor kendala kegiatan

- Ketidaksiapan calon penerima bantuan untuk menjadi sekolah sasaran
- Tim Pendamping tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dikarenakan kesulitan mendapatkan ijin dari kepala sekolah yang bersangkutan
- Kurangnya koordinasi sekolah sasaran dengan tim pendamping
- Kurangnya pemahaman sekolah sasaran dalam pembuatan pertanggungjawaban penggunaan bantuan

- Rekomendasi/catatan untuk peningkatan kualitas kegiatan
 - Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat SMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait juknis pengelolaan bantuan dan jadwal kegiatan
 - Penambahan waktu pelaksanaan dan unsur yang diundang (Kepala Sekolah dan Bendahara untuk seluruh sekolah sasaran) pada saat kegiatan Asistensi
 - Adanya pendataan Rombel Sekolah Sasaran terkait kebutuhan Tim Pendamping

- Rekomendasi/catatan untuk peningkatan kualitas kegiatan
 - Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat SMP dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota terkait juknis pengelolaan bantuan dan pendampingan terkait jadwal kegiatan
 - Menambah jumlah Tim Pendamping agar tidak terlalu meninggalkan tugas mengajarnya.
Adanya pendataan Rombel Sekolah Sasaran terkait kebutuhan Tim Pendamping
 - Sekolah Inti/induk kluster dapat melaksanakan kegiatan pendampingan sesuai dengan proposal dan RAB yang telah disusun bersama kepala sekolah induk klaster, dan disetujui oleh LPMP Kepulauan Bangka Belitung.
 - Sekolah Inti/Induk Kluster dapat menyusun Laporan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan Proposal dan RAB yang telah disepakati bersama.



15. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013

Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMA didukung dengan kegiatan berikut :

- Bimtek Tim Pengembang tingkat Kabupaten/Kota,
- Pendampingan Kurikulum 2013,
- Sosialisasi Bantuan Pendampingan Sekolah Pelaksanaan Kurikulum 2013
- Monitoring Evaluasi.

Berikut capaian kegiatan implementasi Kurikulum 2013 :

➤ Bimtek Tim Pengembang tingkat Kabupaten/Kota

Jenjang	Tanggal Pelaksanaan	Peserta		Tempat Pelaksanaan
		Kuota	Realisasi	
SMA	7 s.d. 9 Maret 2018	26 orang	26 orang	LPMP Kep Babel

Bimtek ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan (updating) Instruktur Kurikulum 2013 jenjang SMP dengan perkembangan kebijakan dan peraturan yang baru.

Peserta kegiatan ini adalah guru mata pelajaran yang pernah mengikuti bimbingan teknis implementasi kurikulum tahun sebelumnya yang akan melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 pada sekolah sasaran tahun 2018.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dengan pola 20 jpl @ 60 menit dengan fasilitator Instruktur Kurikulum yang sudah mengikuti Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 SMA Tingkat Nasional.

➤ Faktor-faktor keberhasilan kegiatan

- Persentase kehadiran peserta adalah secara keseluruhan 100%,
- Kegiatan berjalan lancar selama 3 hari dengan pola 20 jpl

➤ Faktor-faktor kendala kegiatan

- Adanya peserta yang datang terlambat.

➤ Rekomendasi/catatan untuk peningkatan kualitas kegiatan

1). Bagi Direktorat SMA

Agar LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi dilibatkan dalam penyusunan strategi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana baik sesuai kebutuhan.

2). Bagi Dinas Pendidikan Provinsi

- Agar informasi tentang pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat segera disampaikan kepada seluruh komponen yang berkepentingan untuk dapat ditindaklanjuti dengan baik sehingga tujuan, sasaran dan hasil yang diharapkan dapat tercapai.

- Agar peserta pelatihan yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi tidak diberikan tugas lainnya pada saat mengikuti pelatihan sehingga peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dari awal hingga akhir.

3). Bagi LPMP Kepulauan Bangka Belitung

- Penjadwalan kegiatan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi.
- Pemanfaatan website LPMP Kepulauan Bangka Belitung untuk penyebaran informasi kegiatan.

➤ Sosialisasi Bantuan Pendampingan Sekolah Pelaksanaan Kurikulum 2018

Jenjang	Tanggal Pelaksanaan	Peserta		Tempat Pelaksanaan
		Kuota	Realisasi	
SMA	26 s.d. 27 Agustus 2018	2 orang	2 orang	LPMP Kep Babel

Penyaluran Bantuan Pemerintah merupakan program pendukung pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 kepada Sekolah Sasaran yang ditetapkan menjadi Sekolah Inti/ Induk Kluster pada Tahun 2018. Jumlah Bantuan Pemerintah pada tiap-tiap jenjangnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dari direktorat masing-masing. Dana bantuan pemerintah ini bersumber dari APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPMP Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2018 Bantuan Pemerintah Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 disalurkan kepada 2 sekolah sasaran melalui 2 Induk Kluster.

Jangka waktu penggunaan dana bantuan pemerintah mulai dari diterimanya dana s.d. Bulan Desember 2018.

Tahapan penyaluran bantuan meliputi :

- Asistensi bantuan dengan produk Proposal Pendampingan di induk kluster
- Monitoring penggunaan bantuan dan pelaksanaan pendampingan
- Evaluasi dan pelaporan bantuan

➤ Faktor-faktor keberhasilan kegiatan

- Penyaluran bantuan disalurkan sesuai jadwal
- Terlaksananya pendampingan di sekolah induk dan anggota kluster sesuai jadwal
- Tersusunnya laporan pendampingan sesuai jadwal

➤ Faktor-faktor kendala kegiatan

- Ketidaksiapan calon penerima bantuan untuk menjadi sekolah sasaran
- Tim Pendamping tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dikarenakan kesulitan mendapatkan ijin dari kepala sekolah yang bersangkutan
- Kurangnya koordinasi sekolah sasaran dengan tim pendamping
- Kurangnya pemahaman sekolah sasaran dalam pembuatan pertanggungjawaban penggunaan bantuan

➤ Rekomendasi/catatan untuk peningkatan kualitas kegiatan

- Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat SMA dan Dinas Pendidikan Provinsi terkait juknis pengelolaan bantuan dan jadwal kegiatan
- Penambahan waktu pelaksanaan dan unsur yang diundang (Kepala Sekolah dan Bendahara untuk seluruh sekolah sasaran) pada saat kegiatan Asistensi
- Adanya pendataan Rombel Sekolah Sasaran terkait kebutuhan Tim Pendamping

➤ Rekomendasi/catatan untuk peningkatan kualitas kegiatan

- Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat SMA dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait juknis pengelolaan bantuan dan pendampingan terkait jadwal kegiatan
- Menambah jumlah Tim Pendamping agar tidak terlalu meninggalkan tugas mengajarnya.

Adanya pendataan Rombel Sekolah Sasaran terkait kebutuhan Tim Pendamping

- Sekolah Inti/induk kluster dapat melaksanakan kegiatan pendampingan sesuai dengan proposal dan RAB yang telah disusun bersama kepala sekolah induk klaster, dan disetujui oleh LPMP Kepulauan Bangka Belitung.
- Sekolah Inti/Induk Kluster dapat menyusun Laporan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan Proposal dan RAB yang telah disepakati bersama.



16. SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013

Pada tahun 2018 Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMK tidak dianggarkan dalam DIPA LPMP Kepulauan Bangka Belitung karena seluruh satuan pendidikan jenjang SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah melaksanakan Kurikulum 2013.

Selain empat indikator kinerja yang telah dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Kepulauan Bangka Belitung dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terdapat kegiatan penunjang berupa dukungan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan dengan beberapa output sebagai berikut:

1. Layanan Perkantoran
2. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
3. Layanan Internal

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja kunci kegiatan LPMP Kepulauan Bangka Belitung terdapat SDM pegawai yang hadir melaksanakan tugas (termasuk tugas luar) dihitung berdasarkan absensi kehadiran setiap bulannya yaitu: jumlah kehadiran pegawai setiap bulannya (Januari – Desember 2018). Persentase kehadiran pegawai adalah merupakan hasil bagi jumlah kehadiran pegawai dibagi dengan jumlah kehadiran wajib pegawai (jumlah pegawai kali jumlah hari wajib hadir setelah dikurangi hak cutinya).

Tabel 3.29. Tingkat kehadiran pegawai LPMP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

NO	BULAN	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH HARI KERJA	JUMLAH WAJIB HADIR	JUMLAH KEHADIRAN	KINERJA (%)
1	JANUARI	67	20	1340	1318	98.36
2	FEBRUARI	67	20	1340	1314	98.06
3	MARET	67	21	1407	1372	97.51
4	APRIL	67	21	1407	1375	97.73
5	MEI	67	20	1340	1313	97.99
6	JUNI	67	22	1474	1438	97.56
7	JULI	67	16	1072	962	89.74
8	AGUSTUS	67	22	1474	1423	96.54
9	SEPTEMBER	67	21	1407	1372	97.51
10	OKTOBER	67	21	1407	1372	97.51
11	NOPEMBER	67	22	1474	1432	97.15
12	DESEMBER	67	20	1340	1273	95.00
JUMLAH		804	246	16482	15964	96.86

Dari tabel tersebut menunjukkan tingkat kehadiran pegawai LPMP Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan bulan Desember tahun 2018 telah melaksanakan tugas dengan capaian kinerja 96,86 persen. Hal ini disebabkan adanya pegawai yang tidak hadir karena sakit, izin dan tanpa keterangan.

Terkait dengan pemberian tunjangan kinerja bagi seluruh pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2016 tentang tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat dampak pemberian tunjangan tersebut terhadap kehadiran staf LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Realisasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dokumen perjanjian kinerja memerlukan anggaran sebagai dukungannya. Berikut uraian tentang anggaran yang berhasil digunakan dalam upaya pencapaian sasaran tersebut.

Tabel 3.30 Pengukuran Kinerja Keuangan LPMP Kepulauan Bangka Belitung Periode Januari – Desember 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	Rp. 1.984.802.000	Rp. 1.314.902.950	66,25
	1. SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya			
	2. SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya			
	3. SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya			
	4. SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya			
	Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	Rp. 2.890.123.000,-	Rp. 2.462.579.272	85,21
	1. SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP			
	2. SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP			
	3. SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP			
	4. SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP			
	Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013	Rp. 2.856.841.000,-	Rp. 2.636.951.071,-	92,30
	5. .SD yang melaksanakan Kurikulum 2013	Rp . 1.595.878.000,-	Rp. 1.524.622.071,-	95,54
	6. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013	Rp. 1.136.737.000,-	Rp. 1.022.573.100,-	89,96
	7. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013	Rp. 124.226.000,-	Rp. 89.755.900,-	72,25
Terwujudnya tata kelola LPMP Kep Babel yang baik	Data Pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan dan terbaru	Rp 249.440.000,-	Rp. 148.337.971,-	60,30
	Nilai minal SAKIP LPMP Kep Babel			

Berdasarkan data kinerja keuangan di atas dapat dijelaskan bahwa dari dua indikator kinerja yang ada untuk mengukur sasaran strategis, kedua indikator kinerja tersebut sudah ada realisasinya.

Berikut rincian realisasi masing-masing indikator kinerja :

1. Indikator Kinerja : Satuan Pendidikan yang Telah Dipetakan Mutu Pendidikannya, capaian indikator kinerja ini di dukung oleh beberapa kegiatan :
 - a. Sekolah yang terverifikasi Data Mutunya terdiri dari ; Bimtek Fasilitator Daerah, Bimtek Pengawas, Pelaksanaan Pengumpulan Data, Verifikasi dan Validasi.
 - b. Sekolah Yang Terpetakan Mutunya terdiri dari ; Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Peta Mutu, Analisis Data Mutu, Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu dan Diseminasi Pemetaan Mutu

Dari kedua kegiatan tersebut sudah terlaksana semua kegiatan. Target sebesar Rp. 1.984.802.000 realisasi sebesar Rp 1.314.902.950 dengan persentase capaian sebesar 66,25%.

Ketidaktercapaian target anggaran yang ditetapkan karena :

- a. Efisiensi pada belanja perjalanan peserta Pelatihan/ Workshop/ Pembekalan/ Konsolidasi/ Sosialisasi disesuaikan dengan jumlah peserta dan jangka waktu pelaksanaan.
- b. Efisiensi pada belanja bahan, seperti penggandaan dan konsumsi yang disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir dan jangka waktu pelaksanaan.

2. Indikator Kinerja : Satuan Pendidikan yang Telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP. Capaian indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan :

- a. Sekolah Model yang difasilitasi terdiri dari ; Verifikasi Sekolah Model, Bimtek Fasilitator Daerah Sekolah Model, Bimtek SPMI dan Monitoring dan Evaluasi.
- b. Sekolah yang difasilitasi melalui kemitraan terdiri dari : Bimtek SPME, Monitoring dan Evaluasi

Dari kedua kegiatan tersebut sudah terlaksana semua kegiatan. Target sebesar Rp. 2.890.123.000 realisasi sebesar Rp 2.462.579.272 dengan persentase capaian sebesar 85,21%.

Ketidaktercapaian target anggaran yang ditetapkan karena :

- a. Efisiensi pada belanja perjalanan peserta Pelatihan/ Workshop/ Pembekalan/ Konsolidasi/ Sosialisasi disesuaikan dengan jumlah peserta dan jangka waktu pelaksanaan.
- b. Efisiensi pada belanja bahan, seperti penggandaan dan konsumsi yang disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir dan jangka waktu pelaksanaan.

3. Indikator Kinerja : Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum 2013. Capaian indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan :
- a. SD yang melaksanakan Kurikulum 2013 terdiri dari : Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 tingkat Kabupaten/Kota, Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013, Asistensi dan bantuan Pemerintah, Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk Seluruh Jenjang Pendidikan dan Monitoring Evaluasi Bantuan Pemerintah.
 - b. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013 terdiri dari : Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 tingkat Kabupaten/Kota, Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013, Asistensi dan bantuan Pemerintah dan Monitoring Evaluasi Bantuan Pemerintah
 - c. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013 terdiri dari : Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 tingkat Kabupaten/Kota, Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013, Asistensi dan bantuan Pemerintah dan Monitoring Evaluasi Bantuan Pemerintah

Dari ketiga kegiatan tersebut sudah terlaksana semua kegiatan. Target sebesar Rp. 2.856.841.000 realisasi sebesar Rp . 2.636.951.071 dengan persentase capaian sebesar 92,30%.

Ketidaktercapaian target anggaran yang ditetapkan karena :

- a. Efisiensi pada belanja perjalanan peserta Pelatihan/ Workshop/ Pembekalan/ Konsolidasi/ Sosialisasi disesuaikan dengan jumlah peserta dan jangka waktu pelaksanaan.
- b. Efisiensi pada belanja bahan, seperti penggandaan dan konsumsi yang disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir dan jangka waktu pelaksanaan

Selain sasaran strategis di atas LPMP Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan anggaran berupa pengelolaan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan yang didukung oleh tiga output yaitu

1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I target sebesar Rp. 2.431.400.000, realisasi sebesar Rp. 1.703.881.309 dengan persentase capaian sebesar 70,08%.
2. Layanan Internal target sebesar Rp. 6.208.400.000, realisasi sebesar Rp. 5.781.300.200 dengan persentase capaian sebesar 93,13%.
3. Layanan Perkantoran target sebesar Rp. 12.244.284.000, realisasi sebesar Rp. 11.183.744.872 dengan persentase capaian sebesar 91,34%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember tahun 2018 adalah sebesar Rp. 25.083.359.674 ,- atau 87,66 persen. Adapun yang menjadi kendala tidak tercapainya target anggaran sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja

Kepala LPMP Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar disebabkan adanya efisiensi pada perjalanan dinas dan belanja bahan peserta kegiatan.

Selanjutnya alokasi anggaran unit kerja di lingkungan LPMP Kepulauan Bangka Belitung di mana pagu anggaran LPMP Kepulauan Bangka Belitung dalam DIPA tahun 2018 dibagi dalam 3 (tiga) pos pengeluaran belanja, yaitu: (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang, dan (3) Belanja Modal. Pos pengeluaran belanja Pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan. Pos pengeluaran belanja barang meliputi belanja operasional, non operasional, jasa, perjalanan dinas. Pos pengeluaran belanja modal meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap.

Tabel 3.31 Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

JENIS BELANJA	per Desember 2018		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	7.643.429.000	7.441.030.616	97,35
Belanja Barang	14.764.021.000	11.861.028.858	80,34
Belanja Modal	6.208.000.000	5.781.300.200	93,13
Jumlah	28.615.450.000	25.083.359.674	87,66

Tabel 3.32 Realisasi Anggaran Menurut Seksi/Subbag di LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

SEKSI/SUBBAG	per Desember 2018		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Subbag Umum	20.883.684.000	18.668.962.381	89,39
Seksi FPMP	3.030.278.000	2.762.141.771	91,15
Seksi PMS	2.716.686.000	2.337.388.572	86,04
Seksi SI	1.984.802.000	1.314.902.950	66,25
Jumlah	28.615.450.000	25.083.359.674	87,66

Dalam hal akuntabilitas keuangan, terdapat beberapa catatan penting LPMP Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2018, yaitu:

- a. Pagu awal LPMP Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2018 yang terbit pada tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp 28.615.450.000,- dengan Nomor DIPA SP-023.03.2.419577/2018.
- b. Pada bulan Nopember tahun 2018 terjadi Revisi VIII pagu anggaran tetap Rp.28.615.450,- perubahan pada output 001 : Rp.2.463.544.000,- ; output 003 : Rp. 2.411.381.000,- dan output 006 : Rp. 2.856.841.000,-. Perubahan ini berpengaruh pada anggaran yang dialokasikan pada Penetapan Kinerja Kepala LPMP Kepulauan Bangka Belitung

Dari keseluruhan Laporan Akuntabilitas Kinerja LPMP Kepulauan Bangka Belitung, baik penyerapan anggaran maupun fisik pada tahun 2018 perkembangannya dapat dilihat dari Laporan B19 (terlampir).

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala LPMP Kepulauan Bangka Belitung dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah maka capaian realisasi pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dicapai oleh LPMP Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 adalah 100 persen. Sedangkan serapan anggaran sampai bulan Desember 2018 mencapai 87.66 persen, dengan demikian dikemukakan bahwa LPMP Kepulauan Bangka Belitung belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan LPMP Kepulauan Bangka Belitung dan kepada semua elemen masyarakat yang menjadi *stakeholders* dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa LPMP Kepulauan Bangka Belitung sudah merealisasikan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah. Hal ini didukung fakta bahwa kinerja LPMP Kepulauan Bangka Belitung berhasil merealisasikan semua output dari kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan strategis LPMP Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokoknya LPMP Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 mendapatkan anggaran yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebesar Rp. 28.615.450.000,- pada kurun waktu Januari sampai dengan Desember capaian serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 25.083.359.674,- (87,66 persen) dengan sisa anggaran adalah sebesar Rp. 3.532.090.326,-.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga di masa-masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis pencapaian target diatas dapat dirumuskan beberapa langkah penting untuk dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan Rencana Kinerja pada tahun 2019. Adapun langkah-langkah penting yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Tetap konsisten untuk selalu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik dengan pemerintah pusat maupun daerah dan pihak-pihak terkait lainnya
2. Terus berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan anggaran yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis lembaga dengan sebaik-baiknya
3. Pada pengelolaan keuangan lembaga agar dilaksanakan secara optimal yaitu anggaran yang digunakan haruslah benar-benar dapat menghasilkan output dan outcome secara langsung sesuai dengan indikator sasaran strategis yang dibuat.

LAMPIRAN



**Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Kepala LPMP Kepulauan Bangka Belitung
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah**

TUGAS

Membantu Direktur Jenderal Dikdasmen dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab saya, saya akan :

1. Memetakan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Melakukan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional;
3. Melakukan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. Mengembangkan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
5. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
6. Melaksanakan urusan administrasi LPMP.

TARGET CAPAIAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2018	ANGGARAN
1	2		3	4
1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya		1150 sekolah SD,SMP,SMA,SMK	1.542.822.000
	1	SD yang telah dipetakan mutunya	100%	
	2	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	75%	
	Output:			
	<i>SD yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>		809	
	3	SMP yang telah dipetakan mutunya	100%	
	4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	
	Output:			
	<i>SMP yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>		210	
	5	SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	
	6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	
	Output:			
	<i>SMA yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>		67	
	7	SMK yang telah dipetakan mutunya	90%	
	8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	70%	
	Output:			
	<i>SMK yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>		48	
	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP		112 sekolah SD,SMP,SMA,SMK	3.185.119.000
	Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013		368 sekolah SD,SMP,SMA	3.385.754.000
	9	SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
	Output:			
	<i>a. SD yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>		80	
	<i>b. SD yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>		278	1.769.284.000
	10	SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
	Output:			
	<i>a. SMP yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>		26	
	<i>b. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>		88	1.159.210.000
	11	SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
	Output:			
	<i>a. SMA yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>		4	
	<i>b. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>		2	457.260.000
	12	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
	Output:			
	<i>a. SMK yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>		2	
	<i>b. SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>		-	
2. Terwujudnya Tata kelola LPMP Kep Babel yang baik	1	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru	92%	249.440.000
	2	Nilai Minimal SAKIP LPMP Kepulauan Bangka Belitung	78	

Total Jumlah Anggaran Kegiatan Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan : Rp. 28.615.450.000,- (Dua puluh delapan milyar enam ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018 LPMP Kepulauan Bangka Belitung



Dalam jutaan

NO	KOMPONEN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penyerapan Bulanan (Rp Juta)	374	456	787	1.064	1.354	3.505	4.384	4.507	4.635	3.031	2.395	2.123
2	Penyerapan Kumulatif	374	830	1.617	2.681	4.035	7.540	11.924	16.431	21.066	24.097	26.492	28.615
3	% Penyerapan	1,31%	2,90%	5,65%	9,37%	14,10%	26,35%	41,67%	57,42%	73,62%	84,21%	92,58%	100%

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Hamid Muhammad, Ph.D
NIP 195905121983111001

Jakarta, Januari 2018

Kepala LPMP
Kepulauan Bangka Belitung



Enang Ahmadi, M.Pd
NIP 196607021990011001

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
KEADAAN : DESEMBER 2018

FORMAT : B - 19
Kementerian/ Lembaga : Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor DIPA : SP DIPA-023.03.2.419577/2018
Satuan Kerja : Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Dana DIPA : 28.615.450.000
Realisasi : 25.083.359.674
Keuangan Fisik : 87,66%
Fisik : 100,00%

Kode Program/Kegiatan/Output/ Sub Output/Input (1)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL (2)	Sumber Dana (RM/RK) (3)	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Bantuan Sosial		Jumlah Anggaran			Sisa Anggaran (3)
			Satuan (4)	Volume (3)	Realisasi (4)	(%) (3)	Alokasi (4)	Realisasi (3)	Alokasi (4)	Realisasi (3)	Alokasi (4)	Realisasi (3)	Alokasi (4)	Realisasi (3)	Alokasi (4)	Realisasi (3)	(%) (4)	
			(3)	(4)	(3)	(4)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	
5630	PENINGKATAN LAYANAN PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNTUK SELURUH JENJANG	RM	KEG	80	80	100,00%	7.643.429.000	7.441.030.616	14.764.021.000	11.861.028.858	6.308.000.000	5.781.300.200			28.615.450.000	25.083.359.674	87,66%	3.532.090.326
5630.001	SATUAN PENDIDIKAN YANG TERPETAKAN MUTU PENDIDIKANNYA		KEG	14	14	100,00%			2.463.544.000	1.721.207.500					2.463.544.000	1.721.207.500	69,87%	742.336.500
5630.001.001	SEKOLAH YANG TERVERIFIKASI DATA MUTUNYA		KEG	9	9	100,00%			1.984.802.000	1.314.902.950					1.984.802.000	1.314.902.950	66,25%	669.899.050
052	BIMTEK FASILITATOR DAERAH PENGUMPULAN DATA		KEG	1	1	100,00%			44.856.000	8.848.000					44.856.000	8.848.000	19,73%	36.008.000
055	BIMBINGAN TEKNIS PENGAWAS		KEG	1	1	100,00%			282.966.000	208.553.550					282.966.000	208.553.550	73,70%	74.412.450
A	BIMBINGAN TEKNIS PENGAWAS DAN PETUGAS PEMETAAN MUTU		KEG	1	1	100,00%			282.966.000	208.553.550					282.966.000	208.553.550	73,70%	74.412.450
056	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA		KEG	1	1	100,00%			438.680.000	260.556.500					438.680.000	260.556.500	59,40%	178.123.500
A	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA		KEG	1	1	100,00%			438.680.000	260.556.500					438.680.000	260.556.500	59,40%	178.123.500
057	VERIFIKASI DAN VALIDASI		KEG	6	6	100,00%			1.218.300.000	836.944.900					1.218.300.000	836.944.900	68,70%	381.355.100
A	PENDAMPINGAN PENGUMPULAN DATA MUTU SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2018		KEG	1	1	100,00%			149.183.000	112.408.600					149.183.000	112.408.600	75,35%	36.774.400
B	BIMBINGAN TEKNIS DAPODIK TINGKAT PROVINSI		KEG	2	2	100,00%			368.782.000	296.890.300					368.782.000	296.890.300	80,51%	71.891.700
C	RAPAT KOORDINASI EVALUASI PMP TAHUN 2018		KEG	1	1	100,00%			459.970.000	231.279.000					459.970.000	231.279.000	50,28%	228.691.000
D	BIMTEK PENINGKATAN PENGELOLAAN PUBLIKASI LKMP KEP BABEL		KEG	1	1	100,00%			168.843.000	140.115.000					168.843.000	140.115.000	82,99%	28.728.000
E	MONITORING DAN EVALUASI PENGUMPULAN DATA SATUAN PENDIDIKAN		KEG	1	1	100,00%			71.522.000	56.252.000					71.522.000	56.252.000	78,65%	15.270.000
5630.001.002	SEKOLAH YANG TERPETAKAN MUTU PENDIDIKAN		KEG	5	5	100,00%			478.742.000	406.304.550					478.742.000	406.304.550	84,87%	72.437.450
051	PENYUSUNAN PETA MUTU DAN PENGOLAHAN DATA MUTU		KEG	1	1	100,00%			21.591.000	16.752.750					21.591.000	16.752.750	77,59%	4.838.250
A	PENYUSUNAN DATA MUTU DAN ANALISIS DATA MUTU (DIKAS DAN DIKEM)		KEG	1	1	100,00%			21.591.000	16.752.750					21.591.000	16.752.750	77,59%	4.838.250
052	ANALISIS DATA MUTU		KEG	1	1	100,00%			160.090.000	134.389.800					160.090.000	134.389.800	83,95%	25.700.200
A	TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DATA MUTU SEKOLAH MODEL TAHUN 2018		KEG	1	1	100,00%			160.090.000	134.389.800					160.090.000	134.389.800	83,95%	25.700.200
053	PENYUSUNAN REKOMENDASI PENINGKATAN MUTU		KEG	1	1	100,00%			114.506.000	100.443.100					114.506.000	100.443.100	87,72%	14.062.900
A	PENYUSUNAN REKOMENDASI PENINGKATAN MUTU DAN PETA MUTU PENDIDIKAN		KEG	1	1	100,00%			114.506.000	100.443.100					114.506.000	100.443.100	87,72%	14.062.900
054	DISEMINASI PEMETAAN MUTU		KEG	1	2	200,00%			182.555.000	154.718.900					182.555.000	154.718.900	84,75%	27.836.100
A	DISEMINASI PEMETAAN MUTU DIKEM		KEG	1	1	100,00%			49.680.000	41.803.900					49.680.000	41.803.900	84,15%	7.876.100
B	DISEMINASI PEMETAAN MUTU DIKAS		KEG	1	1	100,00%			132.875.000	112.915.000					132.875.000	112.915.000	84,98%	19.960.000
5630.003	SATUAN PENDIDIKAN YANG TELAH DIFASILITASI BERDASARKAN 8 SNP		KEG	7	7	100,00%			2.411.381.000	2.056.274.722					2.411.381.000	2.056.274.722	85,27%	355.106.278
5630.003.001	SEKOLAH MODEL YANG DIFASILITASI		KEG	4	4	100,00%			2.099.369.000	1.800.799.022					2.099.369.000	1.800.799.022	85,78%	298.569.978
053	BIMBINGAN TEKNIS SPMI		KEG	2	1	50,00%			217.416.000	177.934.400					217.416.000	177.934.400	81,84%	39.481.600
A	SUPERVISI DAN EVALUASI SEKOLAH MODEL SPMI		KEG	2	1	50,00%			217.416.000	177.934.400					217.416.000	177.934.400	81,84%	39.481.600
054	PENDAMPINGAN SEKOLAH MODEL SPMI		KEG	2	1	50,00%			1.805.632.000	1.557.014.622					1.805.632.000	1.557.014.622	86,23%	248.617.378
A	PENDAMPINGAN SEKOLAH MODEL SPMI		KEG	1	1	100,00%			1.122.400.000	1.081.671.300					1.122.400.000	1.081.671.300	96,37%	40.728.700
B	PENGUATAN IMPLEMENTASI SEKOLAH MODEL MELALUI FGD DENGAN LKMP LAINNYA		KEG	1	1	100,00%			683.232.000	475.343.322					683.232.000	475.343.322	69,57%	207.888.678
055	MONITORING DAN EVALUASI		KEG	1	1	100,00%			76.321.000	65.850.000					76.321.000	65.850.000	86,28%	10.471.000
5630.003.002	SEKOLAH YANG DIFASILITASI MELALUI KEMITRAAN		KEG	3	3	100,00%			312.012.000	255.475.700					312.012.000	255.475.700	81,88%	56.536.300
052	BIMBINGAN TEKNIS SPME		KEG	1	1	100,00%			123.990.000	88.340.700					123.990.000	88.340.700	71,25%	35.649.300
053	MONITORING DAN EVALUASI		KEG	1	1	100,00%			49.447.000	36.850.000					49.447.000	36.850.000	74,52%	12.597.000
054	DISEMINASI HASIL		KEG	1	1	100,00%			138.575.000	130.285.000					138.575.000	130.285.000	94,02%	8.290.000
5630.006	SATUAN PENDIDIKAN YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013		KEG	16	16	100,00%			2.856.841.000	2.636.951.071					2.856.841.000	2.636.951.071	92,30%	219.889.929
5630.006.001	SD YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013		KEG	6	6	100,00%			1.595.878.000	1.524.622.071					1.595.878.000	1.524.622.071	95,44%	71.255.929
051	BIMBINGAN TEKNIS TIM PENGEMBANG KURIKULUM 2013 TINGKAT KABUPATEN		KEG	1	1	100,00%			66.452.000	54.180.500					66.452.000	54.180.500	81,53%	12.271.500
052	PENDAMPINGAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013		KEG	3	3	100,00%			241.865.000	204.960.171					241.865.000	204.960.171	84,74%	36.904.829
A	PENDAMPINGAN KURIKULUM JENJANG SD		KEG	2	2	100,00%			131.080.000	119.285.100					131.080.000	119.285.100	91,00%	11.794.900
B	RAKOR KURIKULUM TAHUN 2013		KEG	1	1	100,00%			110.785.000	85.675.071					110.785.000	85.675.071	77,33%	25.109.929
053	ASISTENSI DAN BANTUAN PEMERINTAH		KEG	2	2	100,00%			1.185.511.000	1.168.200.000					1.185.511.000	1.168.200.000	98,54%	17.311.000
A	SOSIALISASI BANTUAN PENDAMPINGAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013		KEG	1	1	100,00%			73.511.000	60.200.000					73.511.000	60.200.000	81,89%	13.311.000

B	ASISTENSI BANTUAN PEMERINTAH K13	KEG	1	1	100.00%			1.112.000.000	1.108.000.000				1.112.000.000	1.108.000.000	99,64%	4.000.000
054	MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN PEMERINTAH	KEG	1	1	100.00%			102.050.000	97.281.400				102.050.000	97.281.400	95,33%	4.768.600
5630.006.002	SMP YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013	KEG	5	5	100.00%			1.136.737.000	1.022.573.100				1.136.737.000	1.022.573.100	89,96%	114.163.900
051	BIMBINGAN TEKNIS TIM PENGEMBANG KURIKULUM 2013 TINGKAT KABUPATEN	KEG	1	1	100.00%			175.620.000	141.572.900				175.620.000	141.572.900	80,61%	34.047.100
052	PENDAMPINGAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013	KEG	2	2	100.00%			159.934.000	113.523.100				159.934.000	113.523.100	55,74%	90.134.900
A	PENDAMPINGAN KURIKULUM JENJANG SMP	KEG	2	2	100.00%			159.934.000	113.523.100				159.934.000	113.523.100	70,98%	46.410.900
053	ASISTENSI DAN BANTUAN PEMERINTAH	KEG	2	2	100.00%			747.724.000	718.657.100				747.724.000	718.657.100	96,11%	29.066.900
A	SOSIALISASI BANTUAN PENDAMPINGAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013	KEG	1	1	100.00%			43.724.000	22.657.100				43.724.000	22.657.100	51,82%	21.066.900
B	ASISTENSI BANTUAN PEMERINTAH K13	KEG	1	1	100.00%			704.000.000	696.000.000				704.000.000	696.000.000	98,86%	8.000.000
054	MONITORING DAN EVALUASI	KEG	1	1	100.00%			53.459.000	48.820.000				53.459.000	48.820.000	91,32%	4.639.000
5630.006.003	SMA YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013	KEG	5	5	100.00%			124.226.000	89.755.900				124.226.000	89.755.900	72,25%	34.470.100
051	BIMBINGAN TEKNIS TIM PENGEMBANG KURIKULUM 2013 TINGKAT KABUPATEN	KEG	1	1	100.00%			45.146.000	32.023.400				45.146.000	32.023.400	70,93%	13.122.600
052	PENDAMPINGAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013	KEG	2	2	100.00%			28.500.000	19.460.600				28.500.000	19.460.600	68,28%	9.039.400
A	PENDAMPINGAN KURIKULUM JENJANG SMA	KEG	2	2	100.00%			28.500.000	19.460.600				28.500.000	19.460.600	68,28%	9.039.400
053	ASISTENSI DAN BANTUAN PEMERINTAH	KEG	2	2	100.00%			34.605.000	29.071.900				34.605.000	29.071.900	84,01%	5.533.100
A	SOSIALISASI BANTUAN PENDAMPINGAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013	KEG	1	1	100.00%			10.605.000	5.071.900				10.605.000	5.071.900	47,83%	5.533.100
B	ASISTENSI BANTUAN PEMERINTAH K13	KEG	1	1	100.00%			24.000.000	24.000.000				24.000.000	24.000.000	100,00%	-
054	MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN PEMERINTAH	KEG	1	1	100.00%			15.975.000	9.200.000				15.975.000	9.200.000	57,59%	6.775.000
5630.950	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I	KEG	25	25	100.00%			2.431.400.000	1.703.881.309				2.431.400.000	1.703.881.309	70,08%	727.518.691
5630.950.001	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN	KEG	25	25	100.00%			2.431.400.000	1.703.881.309				2.431.400.000	1.703.881.309	70,08%	727.518.691
051	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	KEG	4	4	100.00%			712.746.000	469.912.065				712.746.000	469.912.065	65,93%	242.833.935
A	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA	KEG	1	1	100.00%			24.750.000	24.461.186				24.750.000	24.461.186	98,83%	288.814
B	PENYUSUNAN RKAKL	KEG	1	1	100.00%			88.092.000	81.308.122				88.092.000	81.308.122	92,30%	6.783.878
C	SUPERVISI DAN ASISTENSI RKAKL	KEG	1	1	100.00%			38.084.000	17.061.922				38.084.000	17.061.922	44,80%	21.022.078
D	KOORDINASI	KEG	1	1	100.00%			561.820.000	347.080.835				561.820.000	347.080.835	61,78%	214.739.165
052	PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	KEG	2	2	100.00%			61.253.000	14.886.947				61.253.000	14.886.947	24,30%	46.366.053
A	PENYUSUNAN LAPORAN DATA SERAP ANGGARAN	KEG	1	1	100.00%			28.491.000	7.671.947				28.491.000	7.671.947	26,93%	20.819.053
B	PENYUSUNAN LKIP	KEG	1	1	100.00%			32.762.000	7.215.000				32.762.000	7.215.000	22,02%	25.547.000
053	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI	KEG	4	4	100.00%			246.020.000	148.337.971				246.020.000	148.337.971	60,30%	97.682.029
A	PENYUSUNAN PROFIL LPMP	KEG	1	1	100.00%			84.740.000	60.090.000				84.740.000	60.090.000	70,93%	24.650.000
B	PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	KEG	1	1	100.00%			24.500.000	6.667.471				24.500.000	6.667.471	27,21%	17.832.529
C	PENERBITAN MAJALAH/JURNAL PENDIDIKAN	KEG	1	1	100.00%			56.060.000	23.312.500				56.060.000	23.312.500	41,58%	32.747.500
D	PEMBUATAN LEAFLET/POSTER/KALENDER	KEG	1	1	100.00%			80.720.000	58.268.000				80.720.000	58.268.000	72,19%	22.452.000
054	PENGLOLAAN KETATAUSAHAAN	KEG	2	2	100.00%			126.115.000	97.698.000				126.115.000	97.698.000	77,47%	28.417.000
A	WORKSHOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	KEG	1	1	100.00%			62.701.000	53.632.000				62.701.000	53.632.000	85,54%	9.069.000
B	PENGLOLAAN BARANG MILIK NEGARA	KEG	1	1	100.00%			63.414.000	44.066.000				63.414.000	44.066.000	69,49%	19.348.000
055	PENGLOLAAN KEUANGAN	KEG	3	3	100.00%			101.856.000	64.583.296				101.856.000	64.583.296	63,41%	37.272.704
A	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	KEG	1	1	100.00%			22.482.000	10.786.096				22.482.000	10.786.096	47,98%	11.695.904
B	PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	KEG	1	1	100.00%			30.431.000	12.590.000				30.431.000	12.590.000	41,37%	17.841.000
C	SATUAN PENGAWAS INTERNAL	KEG	1	1	100.00%			48.943.000	41.207.200				48.943.000	41.207.200	84,19%	7.735.800
056	PELAYANAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	KEG	9	9	100.00%			1.183.410.000	908.463.030				1.183.410.000	908.463.030	76,77%	274.946.970
A	REVISI STANDAR PELAYANAN LPMP	KEG	1	1	100.00%			49.870.000	37.677.000				49.870.000	37.677.000	75,55%	12.193.000
B	PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN ORGANISASI LPMP	KEG	1	1	100.00%			448.952.000	438.847.600				448.952.000	438.847.600	97,75%	10.104.400
C	EVALUASI PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)	KEG	1	1	100.00%			62.480.000	26.582.030				62.480.000	26.582.030	42,54%	35.897.970
D	SUMPAH PHS DAN JABATAN / TEMU ILMIAH LPMP REGION SUMATERA	KEG	1	1	100.00%			32.621.000	25.909.000				32.621.000	25.909.000	79,42%	6.712.000
E	MONEV UN DAN USBN	KEG	1	1	100.00%			156.765.000	94.849.500				156.765.000	94.849.500	60,50%	61.915.500
F	REVISI DAN PERBAIKAN POS LPMP KEP BABEL	KEG	1	1	100.00%			45.218.000	44.061.500				45.218.000	44.061.500	97,44%	1.156.500
G	PERLAWATAN PERTANDINGAN OLARAHAGA KORPRI DAN RANGKAIAN HARDIKNAS	KEG	1	1	100.00%			51.370.000	37.710.000				51.370.000	37.710.000	73,41%	13.660.000
H	SOSIALISASI ZONASI	KEG	1	1	100.00%			214.034.000	199.500.000				214.034.000	199.500.000	93,21%	14.534.000
I	PROGRAM KEMITRAAN DENGAN SEKOLAH	KEG	1	1	100.00%			122.100.000	3.326.400				122.100.000	3.326.400	2,72%	118.773.600
5630.951	LAYANAN INTERNAL	KEG	13	13	100.00%					6.298.000.000	5.781.300.200		6.298.000.000	5.781.300.200	93,13%	426.699.800
5630.951.001	LAYANAN INTERNAL	KEG	13	13	100.00%					6.298.000.000	5.781.300.200		6.298.000.000	5.781.300.200	93,13%	426.699.800
995	PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR	UNIT	1	1	100.00%			546.717.000	428.510.000				546.717.000	428.510.000	78,38%	118.207.000
A	PENGADAAN MINIBUS OPERASIONAL KANTOR	UNIT	1	1	100.00%			546.717.000	428.510.000				546.717.000	428.510.000	78,38%	118.207.000
996	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	KEG	2	2	100.00%			144.000.000	141.428.600				144.000.000	141.428.600	98,21%	2.571.400
A	PENGADAAN LAPTOP	UNIT	8	8	100.00%			124.000.000	122.534.600				124.000.000	122.534.600	98,82%	1.465.400
B	PENGADAAN PRINTER	UNIT	5	5	100.00%			20.000.000	18.894.000				20.000.000	18.894.000	94,47%	1.106.000
997	PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN	KEG	6	6	100.00%			1.164.000.000	941.045.600				1.164.000.000	941.045.600	80,85%	222.954.400
A	PENGADAAN MEUBELAIR KANTOR, ASRAMA, MESS DAN KANTIN	PAKET	5	5	100.00%			606.000.000	528.279.600				606.000.000	528.279.600	87,17%	77.720.400
B	PENGADAAN AC GEDUNG KANTOR, MESS, ASRAMA DAN AULA	UNIT	59	59	100.00%			370.000.000	242.607.500				370.000.000	242.607.500	65,57%	127.392.500
C	PENGADAAN TV 52"	UNIT	5	5	100.00%			125.000.000	123.024.000				125.000.000	123.024.000	98,42%	1.976.000
D	PENGADAAN INFOCUS KANTOR	UNIT	3	3	100.00%			18.000.000	17.286.000				18.000.000	17.286.000	96,03%	714.000
E	PENGADAAN MESIN/POMPA AIR	UNIT	5	5	100.00%			25.000.000	22.308.000				25.000.000	22.308.000	89,23%	2.692.000

998	F	PENGADAAN MESIN RUMPUT		UNIT	5	5	100,00%					20.000.000	7.540.500			20.000.000	7.540.500	37,70%	12.459.500
		PEMBANGUNAN DAN RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN		KEG	4	4	100,00%					4.353.283.000	4.270.316.000			4.353.283.000	4.270.316.000	98,09%	82.987.000
	A	PERBAIKAN SELASAR		PAKET	1	1	100,00%					500.000.000	491.018.000			500.000.000	491.018.000	98,20%	8.982.000
	B	REHABILITASI JALAN KANTOR		PAKET	1	1	100,00%					750.000.000	738.532.000			750.000.000	738.532.000	98,47%	11.468.000
	C	LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN		PAKET	1	1	100,00%					1.103.283.000	1.081.956.000			1.103.283.000	1.081.956.000	98,07%	21.327.000
	D	REHAB GEDUNG AULA DAN RUANG KELAS		PAKET	1	1	100,00%					2.000.000.000	1.958.810.000			2.000.000.000	1.958.810.000	97,94%	41.190.000
5630.994		LAYANAN PERKANTORAN		BLN	12	12	100,00%	7.643.429.000	7.441.030.616	4.600.855.000	3.742.714.256					12.244.284.000	11.183.744.872	91,34%	1.060.539.128
5630.994.001		LAYANAN PERKANTORAN		BLN	12	12	100,00%	7.643.429.000	7.441.030.616	4.600.855.000	3.742.714.256					12.244.284.000	11.183.744.872	91,34%	1.060.539.128
001		GAJI DAN TUNJANGAN		BLN	12	12	100,00%	7.643.429.000	7.441.030.616							7.643.429.000	7.441.030.616	97,35%	202.398.384
002		OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR		KEG	4	4	100,00%			4.600.855.000	3.742.714.256					4.600.855.000	3.742.714.256	81,35%	858.140.744
A		KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		BLN	12	12	100,00%			1.600.710.000	1.427.670.974					1.600.710.000	1.427.670.974	89,19%	173.039.026
B		LANGGANAN DAYA DAN JASA		BLN	12	12	100,00%			633.120.000	507.132.335					633.120.000	507.132.335	80,10%	125.987.665
C		PEMELIHARAAN KANTOR		BLN	12	12	100,00%			1.768.965.000	1.297.981.200					1.768.965.000	1.297.981.200	73,38%	470.983.800
D		PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR		BLN	12	12	100,00%			598.060.000	509.929.747					598.060.000	509.929.747	85,26%	88.130.253

